

Edisi Revisi

# EKONOMI PUBLIK

Ekonomi Publik ini mempelajari tentang peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan pengaruh kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap perekonomian. Kemudian mempelajari berbagai konsep dan ruang lingkup ekonomi publik khususnya yang berkaitan dengan peranan pasar dan pemerintah dalam perekonomian.

Ekonomi Publik adalah keadaan ekonomi yang terjadi di suatu negara sehari-hari guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Misalnya, kondisi ekonomi masyarakat yang sulit akibat kenaikan harga barang dan jasa, sulitnya mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, langkanya lapangan pekerjaan, dan beratnya beban hidup menggambarkan bagaimana pasar bekerja.

# EKONOMI PUBLIK

Edisi Revisi

EKONOMI PUBLIK

SITI RAUDAH, S.Sos., M.AP



SITI RAUDAH, S.Sos., M.AP

ISBN 978-602-1685-85-3



9 786021 685853



# EKONOMI PUBLIK

Penulis :  
Siti Raudah, S.Sos., M.AP



# **EKONOMI PUBLIK**

Edisi Revisi

Penulis

Siti Raudah, S.Sos., M.AP

Penata Letak/Lay out/Penyunting

Perancang Sampul : NisAis

Diterbitkan oleh:

CV. HEMAT Publishing

Amuntai Kalimantan Selatan

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDIT)

**ISBN 978-602-1685-85-3**

**Cetakan I, 2021**

**Cetakan II, 2022**

**Cetakan III, 2023**

**Cetakan IV, 2025**

Dicetak oleh :

Percetakan HEMAT

Jl. Pembalah Batung Paliwara Amuntai Hulu Sungai Utara

Kalimantan Selatan HP. 0852 4851 8739

Email : [cv.hemat239@gmail.com](mailto:cv.hemat239@gmail.com)

## **KATALOG DALAM TERBITAN**

Ekonomi Publik

Oleh Siti Raudah, S.Sos., M.AP

Amuntai : CV. HEMAT

ISBN 978-602-1685-85-3

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang mengutip isi buku, tanpa seizin penerbit/pengarang

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyusun buku **EKONOMI PUBLIK EDISI REVISI** ini.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul pilihan Muhammad SAW, sahabat dan kerabat serta pengikut beliau hingga hari kiamat yang telah mampu mengubah wajah dunia dari alam kegelapan, kejahilan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang yang diliputi oleh Iman, Islam dan Ihsan.

Terus terang masih banyak kekurangan penulis jika mengakui bahwa buku ini sebagai hasil tulisan penulis, sebab sungguh tidak memadai ilmu yang penulis miliki. Penulis hanya menghimpun ramuan dari sejumlah buku, bahan-bahan dari internet dan pengalaman di lapangan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih ada kekurangan, karena terbatasnya pengetahuan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas segenap kekurangannya dan berharap masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini bermanfaat, dan digunakan sesuai dengan ketentuannya.

Amuntai, Juli 2025

Siti Raudah, S.Sos., M.AP

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I</b>	<b>DEFINISI DAN RUANG LINGKUP EKONOMI PUBLIK</b>
A.	Konsep Ekonomi Publik ..... 1
B.	Fungsi dan Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian ..... 5
C.	Landasan Ekonomi Publik..... 11
<b>BAB II</b>	<b>KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL</b>
A.	Konsep Otonomi Daerah ..... 15
B.	Kebijakan dan Strategi Otonomi Daerah..... 24
C.	Desentralisasi Fiskal..... 26
<b>BAB III</b>	<b><i>BALANCE BUDGET</i> ATAU ANGGARAN BERIMBANG</b>
A.	Kebijakan-Kebijakan Anggaran..... 30
B.	Keseimbangan Primer dan Keseimbangan Umum ..... 31
C.	Siklus Anggaran..... 32
D.	Perhitungan <i>Balanced Budget</i> ..... 36
E.	Surplus dan Defisit Anggaran ..... 37
<b>BAB IV</b>	<b>EFISIENSI DAN KEMERATAAN</b>
A.	Efektivitas, Distribusi, dan Pilihan Sosial ..... 40
B.	Menganalisis Pilihan Sosial dan Pilihan Sosial Dalam Praktik. 42
<b>BAB V</b>	<b>KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH</b>
A.	Kegagalan Pasar ..... 43
B.	Kegagalan Pemerintah ( <i>Government Failures</i> ) ..... 62
C.	Anggaran, Birokrat, dan Efisiensi ..... 63
D.	Analisis Ekonomi Mengenai Birokrasi ..... 64
E.	Birokrat dan Efisiensi Alokatif..... 65
<b>BAB VI</b>	<b>TEORI BARANG PUBLIK</b>
A.	Barang Publik dan Syarat Efisiensi Untuk Barang Publik..... 68
B.	Barang Privat Yang disediakan Oleh Pemerintah..... 71
C.	Perbedaan Barang Publik dan Barang Privat..... 73

**BAB VII PRODUKSI PUBLIK DAN BIROKRASI**

<b>A. Produksi Publik &amp; Birokrasi.....</b>	<b>81</b>
<b>B. Monopoli Alamiah, Produksi Publik Barang-Barang Swasta Serta Perbandingan Efisiensi Pada Sektor Publik dan Swasta .</b>	<b>82</b>
<b>C. Sumber Ketidak Efisienan Pada Sektor Publik, Korporatisasi, dan Perkembangan Konsensus Pada Peran Pemerintah Dalam Produksi.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>





## BAB I DEFINISI DAN RUANG LINGKUP EKONOMI PUBLIK

### A. Konsep Ekonomi Publik

Sebelum kita masuk kepada pengertian daripada Ekonomi Publik, maka terlebih dahulu mengetahui bahasan tentang Ekonomi. Ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu keadaan atau kondisi dimana kegiatan berlangsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat. Dan juga bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan keuangan.

Kemudian Istilah "*Publik*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "*orang banyak (umum); Dictionary*, penjelasan tentang istilah "*public*" jauh lebih Panjang, yakni antara lain "*lawan dari privat, berkaitan dengan orang banyak (people in general)* Ekonomi Publik (atau lebih tepatnya Ilmu Ekonomi Publik) adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *Public Economics*."

Kenyataan bahwa kita menggunakan kata serapan *publik* dan tidak menemukan kata asli Bahasa Indonesia sebagai padanan *public* menunjukkan bahwa konsep ini memang relatif baru dalam kebudayaan kita. Bagi sebagian besar masyarakat kita barangkali masih tidak cukup jelas batas-batas antara urusan publik (umum) dan urusan privat (pribadi). Misalnya pengelolaan uang negara adalah urusan publik, maka tidak boleh dikelola secara privat, sehingga tindak korupsi dapat dihindarkan. Sebaliknya, soal iman atau keyakinan pribadi seseorang adalah soal *privat*, sehingga negara tidak boleh campur tangan, supaya hak asasi manusia tidak terlanggar.

Dengan ilustrasi tersebut maka Ekonomi Publik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang peranan pemerintah/negara dalam kehidupan ekonomi, namun karena

yang ditelah lebih menjurus kepada keuangan negara maka sejak tahun 1970-an lebih banyak disebut sebagai ilmu keuangan negara.

Disebut ilmu keuangan negara karena pada intinya mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan negara. Sebagai suatu ilmu, berarti suatu studi dan penjelasan yang didasarkan pada metode dan sistematika tertentu. Dalam kaitan ini metode yang digunakan adalah metode sintetis dan analisis global dan spesial, general serta metode makro analisis dan mikro analisis.

Teori keuangan negara sebagaimana dinyatakan membahas badan-badan hukum publik, yang telah dianugerahi hak-hak hukum publik dan mampu ikut serta dalam proses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dari pada badan swasta dan perseorangan. Sebagai bagian dari ilmu ekonomi, ilmu keuangan negara termasuk ilmu sosial yang tidak murni dan secara khusus membahas masalah keuangan dari sektor pemerintah, antara lain penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah, hutang dan pinjaman pemerintah, kebijaksanaan fiskal dan moneter serta lainnya.

Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat, pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/ deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Menurut Montesqieu [Dalam Priyono dan Zainuddin, 2012 : 37-38] , kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian.

Maka dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Publik adalah keadaan atau kegiatan yang terjadi di suatu negara sehari-hari guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Misalnya, kondisi ekonomi masyarakat yang sulit akibat kenaikan harga barang dan jasa, sulitnya mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan,

langkanya lapangan pekerjaan, dan beratnya beban hidup menggambarkan bagaimana pasar bekerja.

## **1. Hubungan Ekonomi Publik Dengan Ilmu Sosial Lainnya**

### **a. Hubungan Dengan Ilmu Ekonomi**

Ilmu Ekonomi Publik merupakan bagian dari ilmu ekonomi, dengan demikian prinsip yang berlaku dalam ilmu ekonomi juga berlaku dalam ilmu keuangan negara walaupun ada penyimpangan dan kekhususan tertentu. Ilmu ekonomi yang terbagi menjadi mikro dan makro ekonomi memiliki keeratan kuat. Masalah mikro ekonomi seperti permintaan dan penawaran, pasar, teori harga, dan tercapainya kepuasan maksimum, juga berlaku dalam ilmu keuangan negara. Sama halnya dengan masalah makro ekonomi seperti investasi, *saving*, pengeluaran pemerintah, pendapatan nasional.

### **b. Hubungan Dengan Ilmu Hukum**

Dengan melihat ilmu ekonomi publik sebagai suatu pengertian, maka jelas ilmu ini berkaitan erat dengan istilah “negara” yang termasuk dalam istilah hukum privat maupun publik. Ilmu Ekonomi publik akan berkaitan dengan lembaga kenegaraan seperti pemerintah, DPR, BPK. Akan juga terkait dengan Hukum Tata Negara, ketika dihubungkan dengan penyusunan anggaran, penetapan pajak, pungutan pajak, aspek penggunaan sumber penerimaan pemerintah.

### **c. Hubungan Dengan Ilmu Politik**

Pembagian kekuasaan, penggunaan dan pengawasan akan terkait dengan studi ilmu politik. Penentuan budget pembagian atau alokasi budget antar departemen, lembaga resmi dalam perwujudannya adalah aplikasi ilmu politik. Demikian pula dengan penetapan pajak baru, pinjaman pemerintah, PMDN dan PMD adalah juga persoalan politik dalam bingkai negara untuk penguatan keuangan negara.

## 2. Keuangan Negara dan Keuangan Privat

Keuangan negara mencakup bahasan tentang penerimaan dan pengeluaran negara serta masalah dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah sebagai akibat dari pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara. Keuangan privat lebih membahas, masalah keuangan dari unit ekonomi secara individu atau satu unit ekonomi yang tidak membentuk bagian dari pemerintah.

Adapun persamaan keuangan negara dengan keuangan privat sebagai berikut :

- a. keuangan negara dengan keuangan privat berkaitan dengan kegiatan yang menyangkut pembelian dan penjualan serta transaksi lainnya;
- b. keuangan negara dengan keuangan privat dapat membiayai kegiatan yang telah direncanakan, dapat melakukan pinjaman dan melakukan pembayaran kembali;
- c. keuangan negara dengan keuangan privat mempunyai sumber yang terbatas dibandingkan dengan pemuasan kebutuhan manusia.

Perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan privat dapat dilihat dari ciri-ciri keduanya, sebagai berikut:

Keuangan Negara :

- a. Hidup dengan sarana yang lebih kompleks;
- b. Bunga pinjaman lebih rendah dibanding dengan sektor privat;
- c. Mempunyai kemampuan mencetak uang;
- d. Mengikuti prinsip anggaran;
- e. Dalam merencanakan kegiatannya pengeluaran negara ditetapkan terlebih dahulu.

Keuangan Privat :

- a. Sarana yang dimiliki sendiri;
- b. Bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan pasar atau bunga berlaku;
- c. Tidak mempunyai kemampuan mencetak uang;
- d. Mengikuti prinsip pasar;

- e. Merencanakan kegiatan dengan melihat penerimaan yang tersedia.

## **B. Fungsi dan Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian**

Sebelum mengetahui apa fungsi dan peranan pemerintah, lebih dulu mengenal penjelasan mengenai pemerintah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemerintah sebagai (1) sistem yang menjalankan wewenang dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; (2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara); (4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah); (5) negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta); (6) pengurus atau pengelola.

Mengikuti ajaran pemikir tersohor Charles de Montesqieu (dalam Priyarsono, Widyastutik, dan Henny, UT 2017-1.3), kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi kekuasaan-kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya harus setaraf dan seimbang. Ajaran ini kemudian dikenal sebagai prinsip *Trias Politica*. Namun dalam praktiknya, kekuasaan eksekutiflah yang lazimnya paling berpengaruh dalam sebuah perekonomian. Kekuasaan eksekutif juga sering diidentikkan sebagai Pemerintah, yakni untuk negara kita adalah Presiden beserta pembantu-pembantunya. Dalam era otonomi daerah atau era kebijakan desentralisasi dewasa ini patut pula dirinci lebih lanjut tentang adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Peranan pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam system perekonomian kapitalis murni seperti dalam kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith (dalam Mangkoesobroto, 2001:1) bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- 1) Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan

- 2) Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi peradilan
- 3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan dll.

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan-kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan peranannya semakin besar mengatur jalannya perekonomian.

Adam Smith (Dalam Mangkoesobroto, 2001:2), konseptor sistem kapitalis murni mengemukakan ideologinya karena dia menganggap bahwa dalam perekonomian kapitalis, setia individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap individu akan melaksanakan aktivitas yang harmonis seakan-akan diatur oleh tangan gaib. Karena itu, perekonomian dapat berkembang secara maksimum. Oleh karena itu Adam Smith, menyatakan bahwa lingkup aktivitas pemerintah sangat terbatas, yaitu hanya melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta. Peranan pemerintah meliputi 3 bidang saja :

- a) Melaksanakan peradilan;
- b) Melaksanakan pertahanan/keamanan;
- c) Melaksanakan pekerjaan umum.

Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktek menghadapi perbenturan kepentingan, karena tidak adanya koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing individu, misalnya kepentingan pengusaha sering tidak sesuai dengan kepentingan karyawan bahkan sering terjadi kepentingan kedua pihak saling bertentangan. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh karena sektor swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian, sehingga perekonomian tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.

Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain;

- a) menetapkan kerangka hukum (*legal framework*) yang melandasi suatu perekonomian,
- b) mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak,
- c) memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi,
- d) membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan,
- e) mendistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan
- f) menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya.

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasi dalam 3 golongan besar, yaitu :

### 1. Peranan Alokasi

Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang *public*, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain.

Barang publik adalah barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat ditetapkan prinsip pengecualian, atas barang tersebut. Barang yang termasuk dalam barang publik walaupun mempunyai sifat pengecualian, misalnya jalan-jalan dapat disediakan melalui sistem pasar.

Peranan alokasi ini dimaksudkan karena setiap barang/jasa yang tidak disediakan oleh pihak swasta, maka pemerintah akan menyediakannya dan ini juga disebut sebagai barang publik. Karena dalam setiap sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang disediakan oleh swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Tidak dapat tersedianya

barang-barang publik tersebut melalui sistem pasar disebut sebagai kegagalan pasar. Contoh dari barang publik yang tidak disediakan oleh sistem pasar yaitu jalan umum, taman kota, jembatan dll.

Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memuaskan/memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat yang secara efektif tidak dapat dipuaskan oleh mekanisme pasar. Contohnya dalam kegiatan pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta keadilan.

## **2. Peranan Distribusi**

Fungsi distribusi dalam fungsi ekonomi pemerintah adalah sangat terkait erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah yang bersangkutan dan terdistribusi secara proposial dengan pengertian bahwa daerah yang satu dimungkinkan tidak sama tingkat kesejahteraannya dengan daerah yang lainnya karena akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan daerahnya masing-masing.

Untuk itu Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui :

- a. Perpajakan;
- b. Subsidi;
- c. Pengentasan kemiskinan;
- d. Transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin;
- e. Bantuan Pendidikan;
- f. Bantuan Kesehatan, dll.

Peranan distribusi ini merupakan peranan pemerintah sebagai distribusi pendapatan dan kekayaan. Tidak mudah bagi pemerintah dalam menjalankan peranan ini, karena distribusi ini berkaitan erat dengan masalah keadilan. Sedangkan masalah keadilan sudah ini sudah terlalu kompleks, sebab keadilan ini merupakan satu masalah yang bisa ditinjau dari berbagai

persepsi, bahkan masalah keadilan ini juga tergantung dari pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri, karena keadilan itu merupakan masalah yang relatif dan dinamis. Kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan ini memberikan koreksi terhadap distribusi penghasilan yang ada dalam masyarakat.

Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan pajak progresif, yaitu membebankan pajak yang relatif lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih kecil bagi orang miskin, disertai subsidi bagi golongan miskin. Secara tidak langsung, bisa melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah, misalnya : pembangunan perumahan tipe sederhana (RS) dan tipe sangat sederhana (RSS) yang lebih banyak porsinya dibanding rumah mewah, untuk golongan pendapatn tertentu, subsidi untuk pupuk petani, dan lain sebagainya.

Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Kemampuan memperoleh pendapatan tergantung dari hukum yang berlaku. Pemilikan faktor produksi sebagai sumber pendapatan tergantung dari permintaan akan faktor produksi dan jumlah yang ditawarkan oleh pemilik faktor produksi. Permintaan dan penawaran akan faktor produksi menentukan harga dari faktor produksi yang bersangkutan. Permintaan akan suatu faktor produksi tergantung pada teknologi, apabila teknologi dalam menghasilkan suatu barang adalah teknologi padat karya, maka permintaan akan tenaga kerja relatif besar daripada permintaan akan modal, dan pengusaha bersedia membayar tenaga kerja lebih besar daripada modal dan sebaliknya untuk faktor produksi modal. Penawaran suatu faktor produksi tergantung dari pemilihan faktor produksi (yang juga dipengaruhi oleh warisan) dan jumlah yang

ditawarkan, semakin banyak jumlah yang ditawarkan, semakin rendah harga yang didapat oleh pemiliknya.

### 3. Peranan Stabilisasi

Selain peranan alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peranan utama sebagai alat stabilisasi perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Inflasi atau deflasi juga merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, masalah inflasi atau deflasi harus ditangani pemerintah melalui kebijakan moneter.

Kegiatan menstabilisasikan perekonomian yaitu dengan menggabungkan kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan agregat sehingga dapat mempertahankan *full employment* dan menghindari inflasi maupun deflasi. Peranan tabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilkan perekonomian, seperti: terjadi deflasi, inflasi, penurunan permintaan/penawaran suatu barang, yang nantinya masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah yang lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi, dll.

Permasalahannya sekarang ialah bagaimana menyelaraskan seluruh kebijaksanaan yang akan diterapkan jika terjadi suatu masalah, tanpa bertentangan dengan kebijaksanaan yang lain dan tanpa menimbulkan masalah baru. Baik itu kebijaksanaan dalam rangka peranan pemerintah sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi agar efisien, distribusi pendapatan agar merata dan adil, serta stabilitas ekonomi. Demikian juga halnya kebijaksanaan dibidang-bidang lain. Oleh karenanya dituntut kebijaksanaan yang betul-betul seimbang dari pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

### **Kegagalan Pemerintah**

Kegagalan pemerintah yaitu kegagalan pemerintah dalam menciptakan kondisi Pareto Optimal, terdapat beberapa faktor yang menjadi sumber timbulnya kegagalan pemerintah :

1. Campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu;
2. Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah, oleh karena itu maka campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar daripada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah;
3. Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah, pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender, dan sistem yang kompleks;
4. Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi atau *rent seeking behavior*.

Hal-hal tersebut akan menyebabkan bahwa tidak selamanya campur pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Pareto Optimal, bahkan kadang-kadang justru menjauhi kondisi Pareto Optimal.

### **C. Landasan Ekonomi Publik**

Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan masalah makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan). Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa (pemerintah atau bukan) atau bagaimana keputusan ekonomi diambil (melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga). Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian-an semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain), yakni secara umum swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka seyogyanya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini bahwa memang mampu.

Permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi empat. Dua yang pertama tergolong persoalan mikro, dua yang terakhir tergolong makro (Priyarsono dkk UT, 2017 : 1.16), antara lain :

### **1. Bagaimana Cara Produksi**

Sumber daya bersifat langka. Artinya, ketersediaannya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan kita. Keputusan memproduksi sesuatu dalam jumlah tertentu langsung berakibat pada jumlah produksi sesuatu yang lain. Seorang petani pemilik sepetak lahan yang memutuskan menanam sepertiga luas lahannya dengan jagung, pada saat yang sama sesungguhnya memutuskan untuk tinggal mempunyai keleluasaan menggunakan dua pertiga lahan sisanya untuk tanaman lainnya. Itulah yang disebut alokasi sumber daya. Setelah memutuskan akan memproduksi jagung, dia harus menentukan bagaimana cara produksinya.

### **2. Konsumsi**

Setelah dihasilkan, suatu produk bisa langsung dikonsumsi oleh pembuatnya atau dijual untuk dikonsumsi oleh orang lain. Produk suatu perekonomian didistribusikan kepada orang-orang (para konsumen) dalam perekonomian itu. Sebagian orang-orang itu memperoleh banyak, sebagian lagi hanya memperoleh sedikit atau bahkan tidak kebagian sama sekali.

### **3. Seberapa Tinggi Tingkat Pengangguran dan Inflasi?**

Ketika suatu perekonomian mengalami resesi, para penganggur butuh pekerjaan, kantor dan pabrik tersedia, para manajer dan pemilik perusahaan ingin mengoperasikan pabrik-pabrik mereka, bahan baku melimpah, konsumen butuh barang produksi pabrik itu, tapi karena suatu hal akhirnya para penganggur itu tidak dapat memperoleh pekerjaan dan bahan baku tak termanfaatkan. Sementara itu, beberapa data menunjukkan bahwa pengendalian kenaikan tingkat harga sering harus dilakukan dengan terjadinya pengangguran untuk sementara waktu. Apa kaitan antara inflasi dan pengangguran?

#### 4. Apakah Kapasitas Produktif Bertumbuh?

Kapasitas memproduksi barang di beberapa negara bertumbuh pesat, di beberapa negara lain lambat, bahkan ada yang justru mengalami penurunan. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut?

Kebijakan publik berusaha mempengaruhi perekonomian secara mikro (alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan) maupun makro (pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan). Seberapa efektif kebijakan publik dapat mempengaruhi perekonomian bergantung pada beberapa hal, satu di antaranya adalah sistem perekonomian.

Sistem perekonomian adalah metode untuk menjawab empat kelompok pertanyaan tersebut di atas. Suatu sistem perekonomian pasti rumit; mencakup berbagai macam produsen (publik, swasta, domestik, luar negeri), maupun konsumen (tua atau muda, kaya atau miskin, pekerja atau penganggur). Sistem perekonomian juga mencakup hukum (misalnya aturan tentang hak milik, aturan tentang pajak), dan juga kebiasaan-kebiasaan (yang dipengaruhi oleh moral atau norma para pelaku dalam perekonomian tersebut).

Suatu perekonomian lazimnya bersifat unik. Namun secara garis besar dapat digolongkan menjadi sistem komando, sistem pasar, dan sistem campuran. Dalam sistem komando, perilaku ekonomi ditentukan oleh pemerintah pusat. Apa, berapa banyak, dan bagaimana barang-barang diproduksi ditentukan oleh pemerintah pusat. Demikian pula siapa dapat apa dan berapa banyak ditentukan pula oleh pemerintah pusat. Perekonomian dalam sistem ini bercirikan sentralisasi pengambilan keputusan, oleh karena itu sering pula disebut perekonomian terencana secara terpusat.

Dalam sistem perekonomian pasar keputusan alokasi sumber daya dibuat tanpa arahan dari pemerintah pusat. Alokasi sumber daya dalam perekonomian ini merupakan hasil interaksi dari banyak sekali keputusan pelaku-pelaku

independen (produsen maupun konsumen secara individual dan secara bebas). Oleh karena itu sistem demikian sering pula disebut sebagai sistem pasar bebas. Dalam sistem ini keputusan-keputusan ekonomi ditentukan secara terdesentralisasi. Walaupun demikian keputusan-keputusan itu secara otomatis terkoordinasi, yakni melalui mekanisme harga. Maka, sistem ini sering pula disebut sistem harga.

Dalam kenyataannya, tiap perekonomian merupakan campuran dari kedua sistem tersebut. Sebagian dari keputusan ekonomi diambil oleh pemerintah secara terpusat, sebagian lagi diputuskan secara terdesentralisasi oleh berbagai pelaku ekonomi. Beberapa sektor diatur secara ketat oleh pemerintah, sedangkan sektor-sektor lainnya kurang atau sama sekali tidak diatur oleh pemerintah. Di Indonesia beberapa komoditas diatur oleh pemerintah pusat, misalnya bahan bakar minyak, ongkos jalan tol, dan upah buruh. Beberapa yang lain diatur secara lebih lunak (atau lebih tepatnya: pemerintah berusaha mengendalikannya), misalnya harga beras, jasa angkutan umum, dan jasa pendidikan.



## **BAB II**

### **KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL**

#### **A. Konsep Otonomi Daerah**

Secara umum otonomi daerah adalah Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengelola daerahnya sendiri secara mandiri. Banyak definisi lain yang dapat menggambarkan mengenai arti atau makna dari otonomi daerah.

Secara etimologi (harfiah), otonomi daerah berasal dari kata “otonom” dan “daerah”. Merujuk dalam bahasa Yunani sendiri, kata otonom berasal dari kata *autos* yang berarti sendiri dan kata *nomos* yang berarti aturan/undang-undang. Jadi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, pengertian dari daerah otonom adalah daerah tertentu pada suatu Negara yang memiliki kebebasan dari pemerintah pusat diluar daerah tersebut. Berikut

adalah beberapa pengertian otonomi daerah menurut para ahli. (dalam Sri Rahayu, 2018-13)

1. Benyamien Hoesein

“otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada diluar pemerintahan pusat.”

2. Ateng Syarifuddin

“otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.”

3. Syarif Saleh

“Hak mengatur dan pemerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.”

Selain itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang.

Dari pengertian tentang otonomi daerah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kewenangan atau pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan atau permasalahan yang ada di daerah, dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat pemerintahan desa.

## 1. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 108) beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND);
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- j. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain landasan konstitusi yang menaunginya, menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 109-110) otonomi daerah juga dilaksanakan berdasarkan nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia yang akan dijabarkan di bawah ini.

**a. Nilai Otonomi Daerah**

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yakni sebagai berikut :

**1) Nilai Unitaris**

Yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (*eenheidstaat*), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan

negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.

## 2) Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial

Bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

### b. Dimensi Otonomi Daerah

Titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

- 1) **Dimensi Politik**, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
- 2) **Dimensi Administratif**, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;
- 3) **Kabupaten/kota** adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

### c. Prinsip Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

- 1) **Nyata**, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah;
- 2) **Bertanggung jawab**, pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air;
- 3) **Dinamis**, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

d. Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *de* yang berarti lepas, dan *centerum* yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo Saxon dan Kontinental.

- 1) Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi;
- 2) Sementara itu Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. **Dekonsentrasi** merupakan penyerahan atau pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Sedangkan Desentralisasi **ketatanegaraan** merupakan pembagian atau pemberian kekuasaan untuk mengatur

daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

e. Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi

Dalam praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 104) adalah sebagai berikut :

- 1) Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat;
- 2) Mengurangi bertumpuknya atau tumpang tindih pekerjaan di pusat pemerintahan;
- 3) Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat;
- 4) Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah;
- 5) Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- 6) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan;
- 7) Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing;

- 8) Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah;
- 9) Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi;
- 10) Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu;
- 11) Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.

Sedangkan kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi;
- 2) Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu;
- 3) Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan;
- 4) Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele;
- 5) Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 105).

## 2. Urgensi Otonomi Daerah

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonomi dan pelimpahan

daerah untuk mengatur dan kewenangan pemerintah pusat kepemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan pusat. Otonomi daerah urgen untuk dilakukan dikarenakan beberapa alasan, yaitu : (Dalam Sri Rahayu, 2018 : 21-22)

- a. Merujuk dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (game teori), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
- b. Merujuk dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi;
- c. Merujuk dari segi teknik organisatori pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai sesuatu pemerintah yang efisien;
- d. Merujuk dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpuhkan pada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, dan latar belakang sejarah;
- e. Merujuk dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

### **3. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah**

Secara konseptual, tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.

- a. Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD.
- b. Tujuan administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber keuangan.
- c. Tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **B. Kebijakan dan Strategi Otonomi Daerah**

Kebijakan daerah UU 32/2004 menggunakan terminologi “kebijakan daerah”, dimana dalam Penjelasan Umum butir 7 ditentukan bahwa : “Penyelenggara pemerintah daerah dalam

melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya.”

**a. Bentuk Kebijakan Daerah**

a. Kebijakan Daerah dalam bentuk Pembuatan Peraturan Daerah. Contohnya PERDA; Membuat PERDA tidak mungkin bertentangan dengan hukum karena hal itu berarti membuat hukum, yang dapat dilawan dengan *Legal Norm Control Mechanism*; penyalahgunaan kewenangan berarti menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan adanya kewenangan itu sendiri (*deteourmement de prouvoir*), karena itu membuat PERDA merupakan “menggunakan kewenangan” yang walaupun salah atau keliru hanya dapat dilawan dengan *legal norm control mechanism*;

b. Kebijakan Daerah Dalam Bentuk Keputusan

Tidak semua *beschikking* (keputusan) yang salah atau keliru merupakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Melawan hukum adalah berbuat bertentangan dengan hukum, yaitu berbuat tanpa dasar hukum. Dasar hukum berbuat “pejabat” ada yang ditentukan dalam UU ada yang tidak,

yang dikenal dengan diskresi; Pembuatan keputusan yang merupakan penggunaan kewenangan yang diberikan UU yang salah atau keliru, hanya dapat dilawan dengan mengajukan gugatan ke PTUN, Pembuatan keputusan yang salah atau keliru yang dapat dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi adalah penggunaan kewenangan yang dasarnya ditentukan dalam UU yang tidak sesuai dengan keputusan itu, yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Pemeriksaannya dua tingkat, (1) dinyatakan oleh PTUN sebagai *detournement de pouvoir* sehingga keputusan tersebut tidak sah atau batal, dan (2) kemudian baru dibuktikan hal itu dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi oleh pengadilan pidana. Contoh otonomi daerah : a) Penetapan Upah Minimum Regional; b) Pengembangan Kurikulum Pendidikan; c) Penggunaan APBD; d) Pengelolaan Objek Wisata Daerah.

### C. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan dalam bidang keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan (fiskal) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Ini berarti pemerintah daerah diberi lebih banyak wewenang dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya.

Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang lebih luas, di mana kewenangan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks fiskal, ini berarti:

a) Transfer Dana:

Pemerintah pusat mentransfer dana kepada pemerintah daerah melalui berbagai mekanisme, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Daerah juga diberikan kewenangan untuk mendapatkan pendapatan sendiri melalui pajak dan retribusi daerah.

c) Pengelolaan Anggaran:

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran mereka sendiri, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

## **1. Tujuan Desentralisasi Fiskal**

a) Meningkatkan Kemandirian Daerah:

Dengan mengelola keuangan sendiri, daerah diharapkan tidak terlalu bergantung pada bantuan pusat dan dapat lebih mandiri dalam membangun daerahnya.

b) Meningkatkan Efisiensi:

Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kebutuhan lokalnya diharapkan dapat mengelola anggaran dengan lebih efisien.

c) Mendorong Partisipasi Masyarakat:

Desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

d) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan:

Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik di daerah, diharapkan pemerataan pembangunan dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia.

## **2. Kebijakan yang diharapkan**

- a) Pemerataan pembangunan melalui pemenuhan infrastruktur dan pembangunan kawasan ekonomi khusus
- b) Peningkatan kerja sama daerah dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah
- c) Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

## **3. Hubungan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua sisi mata uang yang saling terkait dan mendukung. Otonomi daerah memberikan kewenangan, sedangkan desentralisasi fiskal memberikan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Desentralisasi fiskal yang efektif akan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi daerah dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Namun, desentralisasi fiskal juga dapat menimbulkan tantangan, seperti potensi terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan perlunya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

#### **4. Kelebihan Desentralisasi Fiskal**

- a. Meningkatkan kemandirian daerah: Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
- b. Meningkatkan efisiensi: Pengelolaan keuangan daerah yang lebih dekat dengan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan daerah.

#### **5. Kekurangan Desentralisasi Fiskal**

- a. Kesenjangan fiskal: Daerah yang lebih kaya dapat memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar daripada daerah yang lebih miskin.
- b. Kurangnya kapasitas: Daerah mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola keuangan sendiri.
- c. Ketergantungan pada transfer: Daerah mungkin masih tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.



### BAB III

## ***BALANCE BUDGET* ATAU ANGGARAN BERIMBANG**

#### **A. Kebijakan-Kebijakan Anggaran**

Kebijakan anggaran adalah suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan negara saat perekonomian guncang baik karena inflasi atau deflasi. Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai propenas yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pada dasarnya kebijakan anggaran terbagi atas dua macam, yaitu kebijakan anggaran berimbang dan kebijakan anggaran tidak berimbang.

1. Anggaran Defisit (*Defisit Budget*)/Kebijakan Fiskal Ekspansif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (*Surplus Budget*)/Kebijakan Fiskal Kontraktif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian

pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (*Balanced Budget*), terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
4. Anggaran Dinamis, Adalah suatu bentuk anggaran apabila penerimaan Negara dari tahun ke tahun selalu meningkat dan terbuka dan diiringi meningkatnya pengeluaran Negara, dari sisi penerimaan yang perlu ditingkatkan adalah penerimaan pajak, tabungan dan pinjaman pemerintah.

## **B. Keseimbangan Primer dan Keseimbangan Umum**

Dalam kamus APBN, keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang yang dalam diksi lainnya disebut pula sebagai belanja primer. Apabila nilainya negatif, hal ini bermakna belanja pemerintah masih lebih besar daripada penerimaan, begitu juga sebaliknya jika positif. Pada saat keseimbangan primer negatif, pemerintah perlu menggenjot penerimaan, yang paling mudah dengan menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang yang lama. Semangat pemerintah untuk APBN 2020 menuju keseimbangan primer tentu perlu kita apresiasi dan apa saja yang harus pemerintah lakukan.

Keseimbangan umum merupakan total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran termasuk pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara maka akan terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, jika total pendapatan

negara lebih kecil daripada belanja negara maka akan terjadi defisit anggaran, yang harus ditutup dengan pembiayaan.

$$\text{Keseimbangan Umum} = \text{Pendapatan} - \text{Belanja}$$

Total Posisi keseimbangan umum pada postur APBN menjadi penting sebagai alat analisis kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah. Keseimbangan umum pada postur APBN merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan fiskal tersebut bersifat netral, ekspansif atau kontraktif.

### **C. Siklus Anggaran**

APBN disusun berdasarkan siklus anggaran (budget cycle). Siklus APBN adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Pengelolaan APBN dilakukan dalam lima tahap, yaitu:

#### **1. Perencanaan APBN**

Pada tahap perencanaan, terdapat 6 langkah yang harus dilakukan:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara / Lembaga (Renja-KL)
- b. Pembahasan Renja-KL
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL)
- d. Penyusunan Anggaran Belanja
- e. Penyusunan Perkiraan Pendapatan Negara
- f. Penyusunan Rancangan APBN

## 2. Penetapan UU APBN

Nota keuangan dan Rancangan APBN beserta RKA-KL yang telah dibahas dalam Sidang Kabinet disampaikan Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober. Pembicaraan antara pemerintah dengan DPR terdiri dari berbagai tingkat, yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat I: Pada tingkat ini disampaikan keterangan atau penjelasan pemerintah tentang Rancangan Undang-undang APBN (RUU APBN). Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN di depan sidang paripurna DPR;
- b. Tingkat II: Dilakukan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR dimana masing-masing fraksi di DPR mengemukakan pendapatnya mengenai RUU APBN dan keterangan pemerintah. Jawaban pemerintah atas pandangan umum tersebut biasanya diberikan oleh Menteri Keuangan.
- c. Tingkat III: Pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Menteri Keuangan sebagai perwakilan pemerintah;
- d. Tingkat IV: Rapat paripurna kedua yang berisi tentang penyampaian hasil pembicaraan pada tingkat III dan pendapat akhir dari tiap-tiap fraksi di DPR. Setelah itu, DPR akan menggunakan hak budgetnya untuk menyetujui atau menolak RUU APBN. Kemudian DPR mempersilakan

pemerintah untuk menyampaikan sambutannya berkaitan dengan keputusan DPR tersebut.

Apabila RUU APBN telah disetujui DPR, maka presiden mengesahkan RUU APBN tersebut menjadi UU APBN.

### 3. Pelaksanaan UU APBN

UU APBN yang telah disetujui DPR dan disahkan presiden telah disusun secara terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Ini berarti, untuk mengubah pengeluaran yang berkaitan dengan hal tersebut harus dengan persetujuan DPR. RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan selambat-lambatnya akhir bulan November dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang rincian APBN. Keppres tentang rincian APBN ini menjadi dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk mengusulkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. Mulai 1 Januari tahun anggaran berikutnya, Kementerian Negara/Lembaga dapat melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai dengan dokumen pelaksanaan tersebut.

### 4. Pengawasan pelaksanaan UU APBN

Pengawasan atas pelaksanaan APBN dilaksanakan secara internal oleh Itjen (Inspektorat Jenderal) dan BPKB (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan eksternal oleh BPK. Itjen akan melakukan pengawasan untuk masing-masing

departemen/lembaga sedangkan BPKB akan melakukan pengawasan untuk seluruh departemen dan lembaga. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan:

a. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan memberikan pendapat atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

b. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal.

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan khusus, antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

5. Pertanggungjawaban pelaksanaan UU APBN.

Pada tahap ini Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan tersebut menurut Pasal 30 Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara adalah Laporan Realisasi APBN, Neraca,

Laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampirkan dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya.

Hasil pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, proses tersebut dinamakan siklus.

#### **D. Perhitungan *Balanced Budget***

APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang yang ditunjukkan dengan formula berikut:

$$G - T - B = 0$$

Dimana:

G = seluruh pembelian barang dan jasa (di dalam maupun luar negeri), pembayaran transfer dan pemberian pinjaman bersih

T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak

B = Pinjaman total pemerintah

Sejak APBN 2000, saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih. Pembiayaan dalam negeri dapat diperoleh dari perbankan dalam negeri dan non perbankan dalam negeri. Sedangkan pembiayaan pinjaman luar negeri bersih didapatkan dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) dikurangi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Konsep saldo anggaran

keseluruhan mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai:

$$G - T = B$$

$$B = B_n + B_b + B_f$$

Dimana:

$B_n$  = pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan

$B_b$  = pinjaman pemerintah dari sektor perbankan

$B_f$  = pinjaman pemerintah dari luar negeri

## E. Surplus dan Defisit Anggaran

Defisit atau surplus anggaran yaitu selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Defisit anggaran terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah, dalam hal ini pengeluaran rutin lebih besar dari tabungan yang dimiliki pemerintah. Pemerintah memiliki dua cara untuk membiayai defisit anggaran, pertama pemerintah menaikkan penerimaan pemerintah atau cara kedua pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Selain kedua cara tersebut pemerintah sebenarnya juga dapat melakukan pencetakan uang baru untuk membiayai defisit anggaran, tetapi pencetakan uang baru yang tidak terkendali dapat menyebabkan inflasi.

Surplus dan defisit anggaran adalah dua konsep keuangan yang berbeda. Berikut ini penjelasannya;

### 1. Surplus Anggaran

Surplus anggaran terjadi ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Ini dapat digunakan untuk :

- a. Membayar utang
  - b. Membangun cadangan keuangan
  - c. Membiayai program baru
  - d. Mengurangi beban pajak
2. Defisit Anggaran:
- Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Ini dapat disebabkan oleh:
- a. Kegagalan mengelola keuangan
  - b. Peningkatan pengeluaran yang tidak terkendali
  - c. Penurunan pendapatan
3. Dampak Surplus dan Defisit:
- a. Surplus dapat memperkuat ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor, namun juga dapat menyebabkan pemerintah kurang fokus pada kebijakan pengeluaran yang mendesak.
  - b. Defisit dapat membiayai proyek penting dan memberikan stimulus ekonomi, namun juga dapat menyebabkan peningkatan hutang dan pengurangan belanja publik penting.
4. Kelebihan dan Kekurangan:
- a. Surplus:
    - 1) Kelebihan: Memperkuat ekonomi, membangun cadangan keuangan, dan meningkatkan kepercayaan investor.
    - 2) Kekurangan: Tidak fokus pada kebijakan pengeluaran mendesak, pajak yang terlalu tinggi.

b. Defisit:

- 1) Kelebihan: Membiayai proyek penting, memberikan stimulus ekonomi.
- 2) Kekurangan: Peningkatan hutang, pengurangan belanja publik penting.

Dalam mengelola keuangan, penting untuk memahami konsep surplus dan defisit anggaran untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan keuangan.



## BAB IV EFISIENSI DAN KEMERATAAN

### A. Efektivitas, Distribusi, dan Pilihan Sosial

#### 1. Efisiensi

Terdapat *trade-off* antara pemerataan dan efisiensi. Kurva indifferen untuk individu menggambarkan bagaimana mereka membuat *trade-off* antara barang yang berbeda, kurva kepuasan sosial menggambarkan bagaimana masyarakat membuat *trade-off* antara tingkat kepuasan dari individu yang berbeda. Fungsi kesejahteraan sosial menyediakan sebuah dasar untuk merangking beberapa alokasi dan sumber daya dan kita memilih alokasi yang menghasilkan tingkat tertinggi dari kesejahteraan masyarakat. Prinsip Pareto mengatakan kita harus memilih alokasi yang paling sedikit dari beberapa individu *better off* dan tidak seorangpun *worse off*. Ini berarti bahwa jika beberapa individu kepuasannya meningkat dan tidak seorangpun kepuasannya menurun kesejahteraan sosial meningkat.

Sehingga dapat disimpulkan efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

## 2. Distribusi

**Distribusi** adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Ada juga yang menyebutkan arti distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Dengan kata lain, pengertian distribusi adalah penghubung antara aktivitas produksi dan konsumsi.

Pada pelaksanaannya, distribusi merupakan bagian dari proses pemasaran yang dapat memberikan nilai tambah pada produk melalui berbagai fungsi seperti *utility*, tempat, waktu, dan hak kepemilikan produk. Selain itu, tercipta juga kelancaran arus pemasaran, baik secara fisik maupun non-fisik seperti arus informasi, promosi, negosiasi, pembayaran, dan lain sebagainya.

## 3. Pilihan Sosial

'Teori pilihan rasional, **kadang disebut** teori pilihan **atau teori tindakan rasional** adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada penentu pilihan individu (individualisme metodologis).

Teori pilihan rasional juga berasumsi bahwa seseorang memiliki preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Preferensi tersebut dianggap lengkap (orang tersebut selalu dapat menentukan alternatif yang mereka inginkan atau tak ada alternatif yang diinginkan) dan transitif (apabila pilihan A lebih diinginkan daripada pilihan B dan pilihan B lebih diinginkan daripada pilihan C, maka A lebih diinginkan daripada C). Agen rasional kemudian mempertimbangkan informasi yang ada, kemungkinan peristiwa, dan potensi biaya dan keuntungan dari menentukan

pilihan, dan bertindak konsisten dalam memilih tindakan terbaik.

Rasionalitas sering dijadikan asumsi perilaku individu dalam model dan analisis ekonomi mikro dan muncul di hampir semua penjelasan pembuatan keputusan manusia yang ada di buku pelajaran ekonomi. Rasionalitas juga penting bagi ilmu politik modern, sosiologi, dan filsafat. Versi turunan dari rasionalitas adalah rasionalitas instrumental yang meliputi pencarian cara paling hemat biaya untuk meraih tujuan tertentu tanpa melihat berharga atau tidaknya tujuan tersebut. Gary Becker adalah salah satu pendukung penerapan model perilaku rasional secara luas. Becker dianugerahi Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1992 atas penelitiannya tentang diskriminasi, kejahatan, dan modal manusia.

## **B. Menganalisis Pilihan Sosial dan Pilihan Sosial Dalam Praktik**

Menganalisis Pilihan Sosial dan Pilihan Sosial dalam Praktek jika proyek tidak Pareto improvement, pendekatan umum yang dipakai yaitu memakai imbas efisiensi dan pemerataan. Jika proyek sebuah proyek mempunyai laba *highienis* yang positif dan mengurangi ketidakmerataan, maka proyek dijalankan dan sebaliknya. Dan Jika efisiensi memperlihatkan laba tetapi pemerataan banyak yang hilang, maka terdapat *trade-off* secara umum akan diterapkan kebijakan sistem pajak untuk redistribusi pendapatan.

Cara yang standar yang sanggup dilakukan untuk mengukur laba (benefit) dari beberapa acara atau proyek khususnya individu, yaitu dalam bentuk "*willingness to pay*". Keuntungan sosial diukur oleh aksesori laba yang diterima oleh semua individu. Jumlah yang diperoleh memperlihatkan kemauan membayar total dari semua individu di masyarakat. Perbedaan antara kemauan membayar dan biaya total dari proyek sanggup disebut sebagai imbas efisiensi dari proyek.



## **BAB V**

### **KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH**

#### **A. Kegagalan Pasar**

Sebelum masuk kepada pembahasan terkait masalah kegagalan pasar, maka terlebih dahulu mengetahui pengertian dari pasar tersebut. Berikut ini pembahasan secara singkat tentang pengertian pasar secara umum. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan.

Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.

Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi.

Kegagalan pasar adalah dimana suatu pasar tidak dapat menjalankan secara sempurna sesuai dengan fungsi awal sebagai pasar dan situasi dimana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan ketidakseimbangan.

Secara umum menjelaskan bahwasannya, kegagalan pasar merupakan bentuk dari ketidakmampuan pasar untuk mengelola sumber dayanya dengan tepat. Dalam hal terjadinya kegagalan pasar, maka pemerintah diharapkan Untuk ikut campur tangan agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai, Secara efisien.

Mangkoesebroto, 2001 : 32 mengungkapkan bahwa Kegagalan pasar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor di bawah ini yaitu:

1. Adanya Common goods
2. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar
3. Adanya barang publik
4. Adanya eksternalitas Adanya pasar tidak penuh (*incomplete market*)
5. Adanya kegagalan informasi
6. Unemployment
7. Adanya Ketidakpastian (*uncertainty*)

Kemudian untuk penjelasan secara detail faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar, antara lain :

1. Barang Bersama (*Common Goods*)

Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak pemilikan (*property rights*) yang memberikan hak pemilikan

kepada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut. Pembuatan pagar, sistem hukum untuk memaksakan dilaksanakannya suatu kontrak pekerjaan merupakan pertanda diakuinya hak pemilikan oleh negara. Pertukaran pada dasarnya merupakan suatu tindakan untuk memindahkan hak pemilikan dari satu orang ke orang lainnya.

Untuk beberapa jenis barang, hak pemilikan tidak dapat diberikan kepada satu individu melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat, misalnya saja sebidang padang rumput milik desa, dan sebagainya. Oleh karena manfaat dari barang-barang di atas tidak hanya dirasakan oleh satu individu saja, maka tidak seorang pun yang dapat menjual hak kepemilikannya. Dalam hal situasi seperti ini, maka Hume menyatakan akan timbul apa yang disebut dengan tragedi kebersamaan (*tragedy of the commons*). Hume memberikan contoh sebidang tanah yembalaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok tersebut untuk menggembalakan ternaknya, akan tetapi tidak seorang pun secara individual dapat menjual hak kepemilikannya sehingga tidak ada pasar untuk tanah tersebut. Oleh karena setiap orang dapat menggembalakan ternaknya maka setiap orang akan cenderung untuk menggunakan tanah tersebut secara berlebih-lebihan (*over used*) sehingga tanah tersebut akan menjadi tandus dengan cepat. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal kekayaan yang dimiliki bersama maka perilaku yang optimal bagi setiap individu merupakan tindakan yang tidak optimal dipandang dari segi kelompok. Masalah yang timbul dalam kasus kekayaan bersama karena dua faktor, yaitu *indivisibility* dan jumlah kelompok masyarakat. Adanya *indivisibility* menyebabkan suatu kekayaan tidak dapat diberikan hak pemilikannya kepada setiap anggota kelompok. Apabila jumlah anggota kelompok hanya dua orang, maka di antara kedua orang tersebut akan dapat dibuat suatu perjanjian yang

mengatur penggunaan kekayaan tersebut secara optimal akan tetapi apabila anggota kelompok semakin banyak maka biaya untuk memperoleh persetujuan menjadisemakin besar dan mahal.

Jadi dalam contoh yang dikemukakan oleh Hume di atas, maka terdapat pertentangan antara maksimisasi kepuasan individu dalam jangka pendek dan maksimisasi kepuasan individu dalam jangka panjang. Selain itu, juga terdapat pertentangan kepentingan antara setiap anggota kelompok. Dalam hal ini, maka timbul peranan pemerintah untuk mengatur kekayaan yang masuk dalam kategori kekayaan bersama (*common property*).

Dalam hal kekayaan bersama (*common property*), apabila seseorang yang merasakan manfaat padang penggembalaan tersebut dan bersedia menanggung biaya untuk menanam rumput, berarti orang lain juga akan menerima manfaat tanpa harus ikut menanggung biayanya yang disebut dengan *free riders*. *Free riders* adalah suatu sikap yang tidak menyatakan dengan sebenarnya manfaat suatu barang atau jasa dengan maksud agar ia dapat memanfaatkan barang tersebut tanpa harus membayarnya atau tanpa ikut menanggung biaya pengadaan barang atau jasa tersebut. Bagi setiap individu sikap untuk menjadi *free rider* merupakan tindakan yang rasional, akan tetapi apabila semua orang bertindak sebagai *free riders* maka semua orang akan rugi. Sebagai contoh padang gembalaan di atas. Apabila setiap orang bertindak sebagai *free riders* maka tidak akan ada orang yang mau menanam rumput dan sebagai akibatnya maka padang gembalaan yang subur akan segera berubah menjadi tanah yang tandus.

Tragedi Kebersamaan (*tragedy of the commons*) ini timbul karena kelompok pemilik tidak mau bekerja sama (*cooperative*) dan hanya mengejar kepentingan pribadi.

Dalam hal contoh di atas, menurut David Hume, maka pemerintahlah yang harus melakukan pengaturan atas penggunaan padang gembalaan di atas. Jadi, peranan pemerintah adalah mengalokasikan penggunaan padang gembalaan agar tercapai kepuasan bersama yang optimal (*Pareto Optimal*) dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja membutuhkan biaya, dan karena itu maka pemerintah harus juga menetapkan sistem pembayaran yang sifatnya dipaksakan karena jelas setiap individu tidak bersedia untuk menanggung biaya pengaturan di atas. Sistem pembayaran paksaan tersebut adalah yang umumnya disebut dengan pajak.

Selain perlunya campur tangan pemerintah dalam mengatur kekayaan bersama, *Hirsch* menyatakan adanya barang lain yang juga memerlukan campur tangan pemerintah, yaitu apa yang disebutnya sebagai *positional goods*. *Positional goods* adalah barang yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat ditambah dalam jangka waktu pendek, misalnya tanah di lokasi tertentu, jabatan, dan sebagainya. Apabila setiap orang mempunyai akses (atau dapat menggunakan) atas *positional goods* maka barang tersebut juga akan digunakan secara berlebih-lebihan sehingga keadaan menjadi buruk. Misalnya saja jalan. Setiap orang berhak menggunakan jalan sehingga jalan akan menjadi padat dan nilainya menjadi berkurang dan setiap orang menjadi rugi karenanya. Dalam hal ini maka pemerintah juga diperlukan peranannya dalam mengalokasi penggunaan jalan sehingga setiap orang mencapai kepuasan yang optimal (*Pareto Optimal*).

## 2. Adanya Unsur Ketidaksempurnaan Pasar

Pada pasar persaingan sempurna mekanisme pasar akan dapat menetapkan alokasi sumber ekonomi secara efisien. Pada pasar persaingan sempurna maka setiap produsen maupun konsumen merupakan satu unit yang sangat kecil sehingga baik konsumen maupun produsen secara individual tidak akan

dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi barang yang dijual atau barang yang dibeli. Bagi seorang individu pembeli harga merupakan suatu datum (sesuatu yang given dan tidak dapat dipengaruhi), dan atas dasar harga tersebut konsumen menyesuaikan pembeliannya. Begitu juga dengan produsen, karena harga merupakan suatu datum maka seorang individu produsen hanya menyesuaikan jumlah barang yang dihasilkannya atas dasar harga yang berlaku. Diagram 3.1. menunjukkan kurva biaya marginal (MC - *Marginal Cost*), kurva penerimaan marginal (MR - *Marginal Revenue*) dan kurva penerimaan rata-rata (AR - *average revenue*) pada suatu pasar persaingan sempurna. Produsen yang melaksanakan prinsip keuntungan yang maksimum akan menghasilkan barang X pada tingkat produksi di mana MC - MR, yaitu pada tingkat produksi OX,. Pada tingkat produksi sebesar X, biaya marginal sebesar BX, sedangkan penerimaan marginal sebesar AX. Jadi dengan memproduksi X, maka produsen memperoleh keuntungan sebesar AB sehingga tindakan yang logis bagi produsen adalah menaikkan jumlah barang yang dihasilkannya. Sebaliknya, pada tingkat produksi OX, biaya marginal sebesar CX, lebih besar daripada penerimaan marginal DX, sehingga produksi X, menimbulkan kerugi:” bagi produsen dan tindakan yang logis diambil adalah mengurangi produksinya. Jadi tingkat produksi OX, adalah yang Optimal karena pada produksi X, biaya marginal sama dengan penerimaan marginal.

Pada tingkat produksi OX, tersebut alokasi sumber ekonomi tercapai secara efisien. Pada titik E, MC - P, yang berarti produsen menetapkan harga sesuai dengan tambahan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit terakhir (MC). Harga yang terjadi (P) digunakan seluruhnya untuk membayar faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan X. Sebaliknya, konsumen bersedia membayar sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh kurva permintaan, yaitu sebesar P per unit barang (AR - P).

o  $X_x$ ,  $X_x$ , Jumlah Barang  $X_x$  Diagram 3.1. Pasar Persaingan Sempurna

Pada tingkat harga  $P$ , konsumen bersedia membayar harga tersebut untuk pembelian barang  $X$ . Jadi, di sini jumlah harga yang diminta oleh produsen sama dengan harga yang mau dibayar (atau dikehendaki) oleh konsumen. Karena itu, kondisi alokasi sumber ekonomi yang efisien terjadi apabila  $MC = AR = P$ . Pada pasar persaingan sempurna, keinginan konsumen dan produsen selaras pada jumlah barang sebanyak  $OX$ .

Motivasi produsen keuntungan yang maksimum tercapai pada  $MC = MR$ . Ini tercapai pada tingkat produksi  $X$ . Motivasi konsumen adalah kepuasan maksimum, yaitu pada harga yang sama dengan permintaannya, yaitu pada tingkat pembelian  $X$ . Jadi motivasi konsumen dan produsen secara sendiri-sendiri menetapkan keinginan tingkat produksi dan tingkat pembelian barang sebesar  $OX$ .

Mekanisme harga tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam keadaan pasar persaingan tidak sempurna, misalnya saja pada pasar monopoli.

Pada pasar monopoli, produsen yang mempunyai prinsip keuntungan yang maksimum akan menghasilkan barang  $X$  sebanyak  $OX$ , yaitu tingkat produksi di mana  $MC = MR$ , pada Diagram 3.2. Pada produksi sebesar  $OX$ , tersebut, harga yang dipungut sebesar  $OP$ , sedangkan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan output  $X$ , hanyalah sebesar  $CX$ , yang berarti produsen memperoleh keuntungan monopolis. Produsen tidak bersedia menambah jumlah barang yang dihasilkannya walaupun penambahan produksi tidak menyebabkan ia memperoleh kerugian.

Efisiensi penggunaan sumber ekonomi dan produksi tercapai pada titik  $B$  yaitu pada tingkat produksi  $OX$ , dan harga  $OP$ . Pada titik  $B$  tersebut konsumen bersedia membayar harga

barang sebesar RpBX, atau sebesar RpOP, dan biaya yang diperlukan produsen untuk menghasilkan tambahan barang terakhir (MC) juga sebesar RpOP. Keselarasan antara keinginan konsumen dan produsen tidak terjadi pada titik A, yaitu posisi keuntungan maksimum yang ditetapkan produsen. Produsen menetapkan harga sebesar RpAX, atau RpP, yang harus dibayar oleh konsumen, sedangkan biaya marginal hanya sebesar CX.

Jadi dalam pasar monopoli, tidak ada keserasian antara keinginan produsen (keuntungan maksimum) dengan efisiensi produksi yang terjadi pada tingkat produksi yang lebih besar dan tingkat harga yang lebih rendah.

Pada tingkat produksi yang menjamin efisiensi penggunaan faktor Produksi, produsen memperoleh keuntungan sebesar P.

### 3. Monopoli Alamiah

Ada beberapa jenis barang yang hanya dapat diproduksi UN Ta Produsen saja. Betapa pun pemerintah berusaha untuk Menghanu, Uu monopoli pada produksi suatu industri, akan tetapi persaingan di antar. produsen yang ada akan menyebabkan hanya satu produsen Saja yaa mampu bertahan. Jadi, secara alamiah monopoli tersebut terjadi, \$ masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pasar akan barang tersebyy terlalu kecil atau investasi yang dibutuhkan sangat besar sehingga skala ekonomi yang efisien baru terjadi pada tingkat produksi yang besar. Contoh barang tersebut adalah perusahaan kereta api, perusahaan telepon, perusahaan listrik, dan sebagainya. Keadaan ini disebut monopoli alamiah (*natural monopoly*). Biaya rata-rata pada monopoli alamiah selalu Menurun.

Pada Diagram 3.3. dapat dilihat bahwa permintaan akan barang X sangat kecil, sehingga kurva permintaan (AR) memotong kurva biaya rata-rata (AR) pada bagian yang menurun. Apabila produsen berproduksi pada tingkat produksi

yang oleh masyarakat dianggap efisien, yaitu pada  $MC - AR$  produsen akan menghasilkan  $O_X$ , unit barang, dan menjual barang  $X$  dengan harga  $OP$ . Tetapi pada tingkat produksi  $O_X$ , produsen akan rugi sehingga tingkat produksi  $O_X$ , tidak dapat berlangsung dalam waktu yang lama atau dalam jangka panjang. Pada  $O_X$ , penerimaan total sebesar  $O_X AP$ ) sedangkan pengeluaran total sebesar  $O_X BX$ , sehingga terdapat kerugian sebesar  $BAP P$ . Apabila barang  $X$  merupakan barang yang penting bagi masyarakat sehingga barang tersebut harus diproduksi sebanyak  $O_X$ , unit, maka tidak ada seorang produsen pun yang mau menghasilkannya. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan yang dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Campur tangan pemerintah dapat dengan cara memproduksi barang tersebut oleh pemerintah, atau produksi barang  $X$  dapat diserahkan kepada pihak swasta dengan memberi ganti rugi sebesar  $P ABP$ , sehingga produsen swasta tidak menderita rugi karena besarnya subsidi tersebut menyebabkan penerimaan total sama dengan pengeluaran total ( $TR - TC$ ).

Apabila produksi barang  $X$  diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta yang menganut prinsip keuntungan maksimum, produsen akan memproduksi pada  $MR-MC$ , yaitu pada tingkat produksi  $O_X$ , unit dan harga yang ditetapkan sebesar  $OP$ . Pada tingkat produksi  $O_X$ , harganya menjadi sangat tinggi dan jumlah yang diproduksi terlalu sedikit, sehingga untuk barang produksi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah harus bertindak. Tindakan pemerintah dapat berupa peraturan untuk memperbesar tingkat produksi, dengan menetapkan harga barang tersebut. Pemerintah dapat menetapkan harga sebesar  $OP$ , dan dalam hal ini produsen akan menghasilkan output sebanyak  $O_X$ , unit barang, tetapi pengusaha akan menderita kerugian sebesar  $P ABP$ , yang harus disubsidi oleh pemerintah.

Dalam hal ini akan timbul masalah bagi pemerintah untuk mendapatkan dana guna membiayai subsidi tersebut. Salah satu cara adalah menggunakan dana dari penerimaan pajak. Akan tetapi ini berarti segolongan masyarakat harus membayar pajak yang membiayai subsidi kepada pengusaha. Pemerintah harus berhati-hati dalam memungut pajak agar tindakan pemerintah tersebut tidak menimbulkan gangguan (distorsi) Yang semakin besar terhadap kemampuan mekanisme harga untuk mencapai alokasi faktor-faktor produksi secara efisien. Dengan adanya Subsidi, pemerintah maka barang X dapat dihasilkan dengan harga yang rendah sehingga pembeli barang X mendapat keuntungan. Sebaliknya orang yang harus membayar pajak untuk membiayai subsidi akan menderita kerugian: Hal ini tidak menjadi masalah apabila pembeli adalah juga orang yang membayar pajak. Akan tetapi apabila membeli dan membayar pajak adalah orang yang berbeda, maka dalam hal ini pemerintah mengubah distribusi pendapatan masyarakat. Apabila pembeli barang X adalah golongan Orang kaya dan pajak yang dipungut adalah pajak dari orang miskin, maka pemerintah mendistribusikan pendapatan dari golongan miskin ke golongan kaya. Jadi paretoefisien tidak akan terpenuhi karena kenaikan kesejahteraan golongan yang diuntungkan oleh pemerintah, yaitu golongan pembeli barang X menyebabkan golongan yang harus membayar pajak untuk membiayai subsidi kesejahteraan mereka menjadi berkurang (semakin rendah). Jadi tindakan pemerintah untuk memberi subsidi atau melaksanakan sendiri usaha yang mempunyai monopoli alamiah tidak selamanya merupakan penyelesaian yang efisien.

Penyelesaian lain adalah dengan penetapan harga oleh pemerintah sebesar  $OP$ , per unit. Pada harga  $OP$ , jumlah barang yang diproduksi lebih besar daripada apabila harga barang diserahkan pada produsen, akan tetapi lebih kecil daripada jumlah produksi yang efisien bagi masyarakat. Pada harga  $OP$ , penerimaan pengusaha sama dengan biaya produksi sehingga

pengusaha tidak perlu mendapatkan subsidi untuk menghasilkan barang sebanyak  $OX$ , unit. Di USA, penerapan harga rata-rata adalah kebijaksanaan yang umumnya dilakukan untuk mengatur harga barang yang menyangkut kepentingan umum, seperti listrik, telepon dan sebagainya. Kebijaksanaan harga untuk industri yang berada dalam monopoli alamiah akan dibahas lebih lanjut di Bab XI.

Bentuk monopoli alamiah yang lebih ekstrim adalah bentuk usaha yang mempunyai biaya marginal sama dengan nol, yang dapat dilihat pada Diagram 3.4. Pada Diagram 3.4. dapat dilihat bahwa kurva biaya marginal berhimpit dengan sumbu horisontal. Bentuk usaha yang demikian adalah keadaan di mana konsumsi seorang akan suatu barang/jasa, tidak menambah biaya produksi marginal. Misalnya saja pemancar radio. Tambahan seorang konsumen untuk mendengarkan siaran pemancar radio tidak menyebabkan perusahaan radio tersebut menambah biaya produksinya. Dalam hal ini tingkat produksi yang menyebabkan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi oleh masyarakat adalah pada titik A dan harganya adalah nol, atau dengan kata lain, jumlah barang sebanyak  $OX$ , unit harus disediakan dengan cuma-cuma, oleh karena barang X dapat dinikmati oleh tambahan konsumen tanpa menambah biaya produksi.

Contoh lain dari barang yang mempunyai biaya marginal nol adalah jalan. Pada jalan yang tidak padat atau sepi, tambahan penggunaan jalan oleh satu mobil tidak akan mengganggu pemakai jalan yang lain. Pada jalan yang ramai/padat, tambahan sebuah mobil akan mengganggu (dalam hal ini memperlambat) pemakai jalan lainnya. Oleh karena pada jalan yang tambahan seorang pemakai jalan tidak mengganggu pemakai jalan *lay tep*, maka agar jalan tersebut digunakan secara efisien pemakai jalan tidak bisa dikenakan pajak jalan (*toll*), sebab bertambahnya seorang tidak menyebabkan bertambahnya biaya perjalanan. Dalam hal Bakar PAN

jembatan, pemungutan bea (*toll*) dapat dilakukan, akan tetapi sebaiknya tidak dikenakan pada pemakaian jembatan atau jalan yang kurang optimal, oleh karena pemungutan bea akan menyebabkan pengalihan jembatan atau jalan semakin berkurang, sehingga jalan tersebut tidak digunakan secara efisien.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar, oleh karena adanya monopoli, atau adanya usaha yang mempunyai biaya marginal yang selalu menurun, dan adanya usaha yang mempunyai biaya marginal nol. Mekanisme pasar dapat melakukan alokasi faktor-faktor ekonomi secara efisien hanya pada pasar persaingan sempurna oleh karena hanya pada pasar persaingan sempurna terdapat kesamaan antara motivasi pengusaha ( $MC = MR$ ) dan tingkat produksi yang oleh masyarakat dianggap efisien ( $AC = MR$ ).

#### 4. Barang Publik

Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam jumlah yang terbatas, misalnya pertahanan, peradilan, dan sebagainya. Jenis barang tersebut dinamakan barang publik murni yang mempunyai dua karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaing (*nonrivalry*) dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian (*non excludability*). Oleh karena pihak swasta tidak mau menghasilkan barang publik murni, maka pemerintahlah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Pihak swasta menghasilkan mobil, akan tetapi kalau produksi mobil tersebut tidak diimbangi oleh pembangunan jalan oleh pemerintah, maka kesejahteraan masyarakat tidak mencapai optimum. Pada barang publik murni ini, seseorang tidak bersedia untuk menghasilkannya karena adanya masalah kepemilikan.

## 5. Eksternalitas

Masalah lain yang menyebabkan kegagalan pasar dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi secara efisien adalah adanya apa yang disebut dampak sampingan atau eksternalitas. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Jadi ada dua syarat terjadinya eksternalitas, yaitu:

- 1) Adanya pengaruh dari suatu tindakan, dan
- 2) Tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima.

Eksternalitas dapat timbul sebagai akibat tindakan konsumsi dan eksternalitas ini dapat bersifat positif (menguntungkan) atau negatif (merugikan). Misalnya, Adil memainkan piano keras-keras dan didengarkan oleh tetangganya yang senang akan permainan piano, Adil dikatakan menimbulkan eksternalitas positif oleh karena Adil saat bermain piano tidak bermaksud untuk menyenangkan tetangganya itu tetapi tetangganya mendapat kenikmatan tanpa harus membayar suatu apapun kepada Adil. Akan tetapi apabila tetangga tersebut tidak suka dan merasa terganggu oleh permainan piano Adil ia menerima eksternalitas negatif. Dikatakan bahwa Adil menimbulkan eksternalitas oleh karena tindakan Adil mempengaruhi tetangga yang mendengar, dan Adil tidak menerima pembayaran dari tetangga yang menikmati permainan pianonya serta Adil tidak memberi pembayaran kepada tetangga yang merasa terganggu oleh permainan pianonya.

Selain eksternalitas karena tindakan konsumsi di atas, eksternalitas juga timbul karena suatu aktivitas produksi. Suatu pabrik misalnya, yang dalam proses produksinya menimbulkan pencemaran udara sehingga penduduk di sekitar pabrik

tersebut menderita sakit karena menghirup udara yang tercemar, dikatakan mengakibatkan eksternalitas negatif. Pabrik tersebut dalam menghitung biaya produksi tidak memperhitungkan kerugian masyarakat karena pencemaran udara yang ditimbulkannya. Karena itu, harga yang ditetapkan oleh pabrik terhadap hasil produksinya memang, terlalu rendah karena tidak memperhitungkan kerugian masyarakat. Polusi udara yang ditimbulkan pabrik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, akan tetapi juga merugikan masyarakat sebagai produser barang lainnya karena polusi yang negatif akan menaikkan biaya produksi, pabrik lain yang menggunakan udara bersih, karena pabrik itu harus mengeluarkan biaya untuk membersihkan udara. Sebaliknya, eksternalitas positif akan menyebabkan keuntungan bagi masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Bagi produsen eksternalitas positif akan menyebabkan turunnya biaya produksi.

Kita harus membedakan dua jenis eksternalitas, yaitu *technical externalities* dan *pecuniary externalities*. Contoh yang diberikan di atas adalah apa yang disebut dengan *technical externalities*, yaitu tindakan seseorang dalam konsumsi atau produksi akan mempengaruhi tindakan konsumsi atau produksi orang lain tanpa ada kompensasinya. Di lain pihak, yang disebut dengan *pecuniary externalities* menyangkut harga dalam perekonomian, yaitu dengan mempengaruhi kendala anggaran (*budget constraints*). Misalnya saja, suatu *pecuniary externalities diseconomy* merupakan akibat dari perubahan harga faktor produksi sebagai akibat tindakan produksi atau konsumsi orang lain. *Pecuniary externalities* hanya mempengaruhi harga, tanpa mempengaruhi kemungkinan teknis (*technical possibilities*) produksi atau konsumsi. |

Dalam hal adanya eksternalitas produksi yang negatif atau *production externalities diseconomy*, biaya pribadi (*private*

costs), yaitu biaya yang dihitung oleh pabrik untuk membayar semua faktor produksi yang digunakan menjadi terlalu kecil karena tidak memperhitungkan kerugian masyarakat, akibatnya barang yang dihasilkan oleh pabrik tersebut cenderung menjadi terlalu banyak. Suatu pabrik misalnya, tidak akan memperhitungkan bagaimana dampak pembuangan limbah ke sungai yang dirasakan oleh masyarakat lainnya yang menggunakan air sungai tersebut. Suatu tindakan produksi tidak hanya menghasilkan eksternalitas yang negatif saja akan tetapi mungkin juga mengakibatkan eksternalitas yang positif. Misalnya suatu pabrik yang membangun jalan, menyebabkan tanah penduduk di sekitar jalan itu mengalami kenaikan nilai. Kenaikan nilai tanah penduduk ini tidak termasuk dalam perhitungan pabrik sewaktu membangun jalan dan penduduk tidak memberi kompensasi kepada pabrik atas kenaikan nilai yang mereka peroleh.

Karakteristik eksternalitas dapat dilihat pada skema di bawah.

Pihak yang melakukan Pihak yang menerima aktivitas eksternalitas  
 1 Konsumen Konsumen 3 2 Produsen LL — Produsen. 4

Jadi dalam perekonomian terdapat empat kemungkinan eksternalitas, yaitu:

- 1) konsumen-konsumen, yaitu tindakan seorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas bagi konsumen lain, misalnya contoh permainan piano di atas.
- 2) konsumen-produsen, yaitu tindakan seorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas (positif atau negatif) terhadap produsen, misalnya olah raga yang dilakukan buruh menyebabkan mereka menjadi sehat dan sehingga produktivitas meningkat dan menguntungkan produsen.

- 3) produsen-konsumen, contohnya adalah pabrik yang menyebabkan polusi sungai sehingga mengganggu penduduk yang menggunakan air sungai tersebut.
- 4) produsen-produsen, contohnya adalah seperti dikemukakan di atas, di mana sebuah pabrik yang menimbulkan polusi air mengakibatkan kenaikan biaya produksi perusahaan lain yang menggunakan air sebagai salah satu faktor produksi.

Eksternalitas ini menyebabkan harga-harga yang ditetapkan pengusaha tidak mencerminkan kelangkaan faktor produksi. Dalam hal pabrik yang menimbulkan polusi sungai, karena kalkulasi harga hasil produksi tersebut, tidak memperhitungkan eksternalitas yang diterima oleh penduduk yang menggunakan air, maka biaya untuk pabrik menjadi lebih kecil dari pada biaya masyarakat, sehingga produksi pabrik menjadi terlalu besar. Dalam hal ini peranan pemerintah adalah untuk mengatur produksi dari pabrik tersebut, yaitu pemerintah membuat peraturan agar biaya pribadi yang dikalkulasi oleh pabrik sama dengan biaya masyarakat. Misalnya pemerintah mengharuskan pabrik untuk memurnikan air yang digunakan pabrik, sebelum air tersebut dibuang ke sungai. Adanya peraturan tersebut menyebabkan biaya perusahaan menjadi lebih tinggi sehingga jumlah barang yang dihasilkan menjadi lebih sedikit.

Misalnya sebuah pabrik kertas yang menyebabkan polusi air sungai. Kurva DD pada Diagram 3.5. menunjukkan kurva permintaan akan kertas dan S,S, menunjukkan kurva penawaran yang didasarkan pada kalkulasi biaya pabrik kertas. Harga dan jumlah keseimbangan adalah OH, dan OX, unit per tahun yaitu harga dan jumlah keseimbangan yang akan terjadi dalam pasar persaingan sempurna. Misalkan pada produksi sebesar OX, unit tersebut menimbulkan eksternalitas terhadap masyarakat yang menggunakan air sungai karena mereka menderita sakit kulit dan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk berobat sebesar Rp100.000,00 maka setiap unit yang

dihasilkan menyebabkan biaya masyarakat sebesar Rp100.000,00/ OX, (sama dengan k). Apabila pabrik tersebut diharuskan untuk membayar pajak sebesar Rpk per unit barang yang dihasilkan, maka kurva S,S , akan bergeser ke kiri (atau ke atas) sebesar Rp k. Hal ini akan mengakibatkan harga kertas menjadi lebih tinggi, yaitu menjadi Rp H,, sedangkan jumlah yang dihasilkan menjadi lebih sedikit, yaitu sebesar X, unit per tahun. Pendapatan pemerintah dari pajak adalah sebesar Rpk dikalikan X, dapat digunakan untuk membayar kompensasi kepada masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut.

Masalah polusi atau masalah lingkungan adalah masalah yang pelik sehingga analisis di atas merupakan analisis yang sangat disederhanakan. Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan taraf hidup masyarakat senantiasa menimbulkan dampak: terhadap lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh semakin banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat menyebabkan pencemaran lingkungan hidup berupa pencemaran udara, air dan darat. Dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan hidup ini, pemecahannya bukanlah untuk menghilangkan pencemaran, sebab hal itu tidak mungkin dilakukan apabila kita menghendaki kenaikan taraf hidup masyarakat. Yang harus dipertimbangkan adalah tingkat pencemaran optimal dari setiap kegiatan. Ini bukanlah masalah yang mudah oleh karena eksternalitas tidak hanya diakibatkan oleh suatu kegiatan produksi saja, melainkan ditimbulkan oleh banyak aktivitas produksi yang dilakukan oleh pabrik Yang menimbulkan jenis polusi yang berbeda-beda. Jadi di sini pemerintah harus menentukan seberapa banyak sebuah pabrik menimbulkan polusi, seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh pabrik tersebut dan berapa besar jumlah denda yang dikenakan terhadap pabrik tersebut.

Adanya eksternalitas dari suatu kegiatan menyebabkan sistem perekonomian yang menggunakan sistem pasar

persaingan sempurna tidak dapat melaksanakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien, karena harga tidak mencerminkan dengan tepat akan kelangkaan faktor produksi. Dalam hal eksternalitas yang negatif, biaya produksi yang ditanggung oleh pengusaha lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang diderita oleh masyarakat atau biaya sosial. Dalam hal eksternalitas yang sifatnya positif, biaya produksi lebih besar daripada biaya sosial, sehingga barang yang dihasilkan adalah lebih sedikit dari jumlah yang oleh masyarakat dianggap efisien.

Adanya eksternalitas menimbulkan peranan alokasi pemerintah dalam perekonomian. Dalam hal eksternalitas disekonomi yang negatif, ada beberapa hal dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, pemerintah mengenakan pajak pada penyebab polusi sampai polusi yang ditimbulkannya mencapai tingkat nol. Asumsi kebijakan yang ekstrim ini adalah suatu anggapan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang bersih. Akan tetapi untuk mempertahankan hak setiap individu di atas maka terdapat biaya oportunitas, yaitu kerugian masyarakat atas barang yang dihasilkan, sehingga tingkat eksternalitas yang optimal bukanlah nol.

Dalam hal eksternalitas negatif pemerintah mengupayakan agar tingkat produksi yang berlebihan dapat dikurangi, sebaliknya, dalam kasus eksternalitas positif maka tindakan pemerintah adalah mengupayakan agar produksi barang dan jasa dapat ditingkatkan, bahkan mungkin dengan menghasilkannya sendiri.

Pembahasan mengenai eksternalitas secara lebih mendalam dan cara mengatasinya agar tercapai alokasi sumber ekonomi yang efisien akan dibahas lebih mendalam pada Bab VII.

Jumlah polusi yang optimum, di mana sumbu mendatar menunjukkan banyaknya polusi yang dikurangi: semakin ke kanan berarti semakin bersih lingkungan dari adanya

pencemaran. Kurva AA adalah kurva yang menunjukkan manfaat marginal (marginal benefit) bagi masyarakat. Kurva ini mempunyai sudut arah yang negatif, berarti semakin banyak polusi yang dihindarkan semakin kecil manfaat yang diterima masyarakat dari pengurangan polusi. , Pada lingkungan yang sangat cemar, banyak sumber-sumber ekonomi yang harus dialihkan dari kegiatan produksi ke kegiatan lain seperti kesehatan dan sebagainya oleh karena itu usaha untuk mengurangi pencemaran akan memberikan manfaat yang sangat besar. Pada lingkungan yang bersih bebas dari pencemaran, usaha untuk mengurangi pencemaran akan memberikan manfaat yang tidak berarti. Kurva BB menunjukkan biaya marginal bagi masyarakat untuk mengurangi pencemaran. Semakin banyak pencemaran yang akan dikurangi semakin mahal biaya bagi masyarakat karena semakin banyak sumber-sumber ekonomi yang harus dialihkan dari kegiatan produksi ke kegiatan untuk menghilangkan pencemaran. Pencemaran yang optimum terjadi pada perpotongan kurva BB dan kurva AA, yaitu adanya pencemaran sebesar OM.

#### 6. Adanya Pasar Tidak Lengkap (Uncomplete Market)

Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Ada beberapa jenis jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup walaupun biaya penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayar masyarakat. Kondisi seperti ini disebut sebagai pasar yang tidak lengkap. Misalnya saja pada asuransi untuk menghadapi suatu risiko tertentu. Dalam hal seperti ini maka pemerintah harus menyediakan jasa tersebut.

## 7. Adanya Kegagalan Informasi

Pada beberapa kasus masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, misalnya saja prakiraan cuaca. Para petani, pelaut, sangat membutuhkan informasi mengenai prakiraan cuaca, akan tetapi tidak ada pihak swasta yang menyediakan informasi mengenai prakiraan cuaca. Dalam hal ini, maka pemerintah yang harus menyediakan informasi cuaca yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

### **B. Kegagalan Pemerintah (*Government Failures*)**

Adanya kegagalan pasar merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Walaupun demikian, tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan secara sistematis senantiasa terjadi kegagalan pemerintah (*government failures*). Ini disebabkan karena pemerintah melaksanakan fungsi alokasi tidak dengan cara yang efisien. Ketidakefisienan pemerintah disebabkan karena 4 hal, yaitu: informasi yang terbatas, Pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta, pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat, hambatan dalam proses politik.

1. Informasi yang terbatas. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak dapat dilihat dampaknya karena sangat rumit dan sulit untuk diperhitungkan sebelumnya. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk menghapuskan subsidi pupuk bagi petani sangat sulit untuk diperhitungkan secara akurat dampaknya bagi seluruh masyarakat.
2. Pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta. Suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan reaksi pihak swasta dan sering sekali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi tersebut. Misalnya saja, apabila pemerintah menurunkan subsidi BBM

khususnya untuk bensin. Ini akan menyebabkan pemilik mobil beralih kepemilikan kendaraan yang menggunakan solar sehingga permintaan akan solar menjadimeningkat dan harganya naik. Dalam hal ini, karena pertimbangan untuk memiliki mobil sepenuhnya berada pada swasta/masyarakat maka pemerintah tidak dapat melarang seseorang untuk menjual mobil yang menggunakan bensin ke mobil yang menggunakan solar.

3. Pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat perilaku para birokrat, sedangkan pelaksanaan kebijakan pemerintah umumnya didelegasikan pada berbagai tingkatan birokrat yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga kebijakan pemerintah mungkin menimbulkan hasil yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Misalnya kebijakan deregulasi pemerintah yang bermaksud untuk mengurangi perizinan, pada pelaksanaan di daerah kadang berbeda dengan apa yang digariskan oleh pemerintah pusat.
4. Hambatan dalam proses politik. Dalam suatu negara demokratis terdapat pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sering terjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif terhambat oleh proses pengambilan keputusan karena harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak legislatif.

### **C. Anggaran, Birokrat, dan Efisiensi**

Suatu sistem ekonomi tergantung pada kerangka institusional dan dalam hal pembahasan mengenai sektor publik yang penting adalah birokrasi. Birokrasi dapat didefinisikan sebagai berbagai departemen yang menangani penyediaan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah. Setiap birokrasi merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan yang dibiayai dengan memberikan gaji dan bukan dari penjualan output yang dihasilkannya. Setiap biro dalam melaksanakan tugas dapat saling bekerja sama (komplementer) atau bersaing dalam menggunakan sumber ekonomi yang langka.

Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk menjamun tercapainya penggunaan sumber ekonomi yang efisien yang tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar bebas. Ekonomis membedakan efisiensi, menjadi dua, yaitu alokatif efisiensi (*allocative efficiency*) dan X-efisiensi (*X. efficiency*). Yang dimaksud dengan alokatif efisiensi adalah alokasi sumber. sumber ekonomi sesuai dengan kendala anggaran (*budget constraints*) konsumen barang dan jasa. X-efisiensi menunjukkan kondisi pada penawaran (*supply side*), yaitu apakah penyediaan suatu barang atau jasa sudah dilaksanakan dengan biaya yang minimum? Dengan kata lain, X efisiensi menunjukkan kondisi di mana penyediaan barang atau jasa tidak terjadi pada batas efisiensi (*efficiency frontier*).

#### **D. Analisis Ekonomi Mengenai Birokrasi**

Di atas telah dikatakan bahwa pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian alokasi sumber ekonomi yang efisien. Akan tetapi, Birokrat yang terdiri dari banyak organ pemerintah tidaklah melaksanakan fungsi pemerintah tanpa mempertanyakan kebijakan pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Weber. Pandangan Weber ini dimodifikasikan oleh Niskanen yang menyatakan bahwa birokrat, sebagaimana juga dengan orang lain, adalah pihak yang memaksimumkan kepuasannya, yaitu gaji, jumlah karyawannya, reputasi, dan status sosialnya. Karena fungsi utilitas birokrat berkaitan dengan besarnya anggaran, maka seorang birokrat yang berusaha mencapai kepuasan yang maksimum berarti pula ia merupakan orang yang memaksimumkan anggaran pemerintah. Karena seorang birokrat bukanlah seorang yang netral terhadap proses pembuatan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, birokrat cenderung akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah.

Kurva CGD menunjukkan kurva permintaan sedangkan kurva LRMC-. LRAC menunjukkan biaya marginal dan biaya rata-rata

jangka panjang yang kita asumsikan mempunyai struktur biaya konstan (*constant return to scale*). MR menunjukkan kurva penerimaan marginal.

Perusahaan swasta yang berada dalam posisi monopoli akan menentukan tingkat output sebesar  $O$ , menetapkan harga sebesar  $OP$ , dan memperoleh keuntungan monopolis sebesar  $P$  CBP. Sebuah perusahaan yang tidak memperoleh keuntungan akan menghasilkan output sebesar  $OO$ , dan akan menetapkan harga sebesar  $OP$ . Kita asumsikan birokrat memperoleh anggaran sebesar  $OP$ ,  $AO$ , yang ditentukan oleh proses politik. Birokrat tersebut cenderung akan menghasilkan output sampai tingkat  $OO$ , yang lebih besar daripada tingkat output yang dihasilkan pengusaha monopolis atau pengusaha yang tidak mementingkan keuntungan. Apabila  $OP$ , merupakan tingkat harga yang menjamin Pareto Optimal maka seorang monopolis cenderung akan menghasilkan output di bawah tingkat Output Optimum. sebaliknya seorang birokrat cenderung akan menghasilkan output yang lebih besar daripada output optimum. Keduanya menimbulkan *welfare loss*. Pada kasus pengusaha monopolis, *welfare loss se CBF* dan pada kasus birokrat *welfare loss sebesar FAG* yang merupakan pengurangan kesejahteraan masyarakat dan merupakan kerugian bagi seluruh masyarakat.

#### **E. Birokrat dan Efisiensi Alokatif**

Analisis ekonomi mengenai birokrasi pertama kali dikemukakan secara formal oleh Niskanen yang kemudian dikembangkan oleh ekonom lainnya seperti Downs and Tullock: Breton, Wintrobe, dan Jackson. Analisis Niskanen dapat dijelaskan dengan menggunakan Diagram 3.8.

permintaan dari median voter yang merupakan anggota masyarakat yang representatif. Apabila barang publik disediakan dengan mekanisme pasar maka kurva  $D$  merupakan kurva permintaan pasar

a dan b merupakan besaran (konstan) sedangkan  $Q$  menunjukkan tingkat output (atau jasa yang diberikan oleh birokrat). Kurva TB menunjukkan total manfaat yang diterima oleh media voter (yang mewakili masyarakat). Dari persamaan TB kita dapat memperoleh kurva MV:

Total Biaya untuk menghasilkan barang /jasa oleh birokrat ditunjukkan dengan persamaan:  $TC = c_0 + dQ$ , di mana  $c_0$  dan  $d$  merupakan konstan, dan  $Q$

Selanjutnya kita asumsikan bahwa birokrat merupakan penjual monopolis (dalam hal ini birokrat menjual jasa) sedangkan legislatif (dalam hal ini adalah DPR yang mewakili rakyat) yang mempunyai dana, merupakan pembeli monopolis sehingga keduanya masing-masing mempunyai kedudukan bilateral monopoli. Birokrat menginginkan dana anggaran sebesar mungkin sedangkan masyarakat menginginkan manfaat yang sebesar-besarnya, jadi dalam hal ini kendala anggaran terjadi di mana biaya total tidak mungkin melebihi manfaat total, atau:

Dari persamaan-persamaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat output di mana  $TB = TC$  dua kali: lebih besar daripada tingkat output yang secara sosial optimal (*socially optimal*). Hal itu bisa terjadi sebab birokrat memiliki informasi mengenai manfaat dan biaya, informasi mana yang tidak dimiliki oleh legislatif. Oleh karena itu, saat birokrat mengajukan anggaran kepada badan legislatif, birokrat mengajukan anggaran yang lebih besar daripada yang secara sosial merupakan tingkat output yang optimal. Birokrat bisa mengambil surplus konsumen dan mengalihkannya pada produksi output yang lebih besar.

Kritik terhadap teori perilaku birokrat yang cenderung mengajukan dana/anggaran yang lebih besar daripada tingkat produksi output yang secara sosial adalah optimal (*socially optimal*), datang dari beberapa ekonomi, di antaranya Jackson yang berpendapat bahwa fungsi utilitas birokrat tidaklah sekedar memaksimalkan kepuasan mereka dengan memaksimalkan

anggaran, akan tetapi lebih kompleks dan pada :tu. Bwrokrat juga mempunyai kepuasan dalam melayaru masyarakat atau melaksanakan tugas bagi kepentingan umum.

Model Niskanen menunjukkan adanya kemungkinan tenadinya inefisiensi dalam alokasi sumber ekonomi yang berasal dari para bwokret secara potensial yang merupakan salah satu dari sumber terjadinya mefimenai birokratif Ada segolongan masyarakat yang menganggap bahwa output pementah terlalu banyak, akan tetapi ada juga golongan masyarakat lainnya yang menganggap bahwa output pementah terlalu sedikit, sedangkan median voter menganggap bahwa output pementah sudah tepat. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat terdapat berhagu pandangan mengenai besar keaiinya birokrasi, dan kuta tidak mungiuun memuaskan semua orang.



## BAB VI TEORI BARANG PUBLIK

### A. Barang Publik dan Syarat Efisiensi Untuk Barang Publik

#### 1. Definisi dan Sifat Barang Publik

Barang publik (*public goods*) dapat didefinisikan sebagai suatu barang yang mana barang tersebut dibutuhkan serta dinikmati oleh semua masyarakat. Dalam mendapatkan barang publik, kita tidak perlu mengeluarkan usaha atau uang. Juga dalam penggunaan barang publik. Pemanfaatannya tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakannya.

Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan habis untuk individu lainnya, barang publik yang disediakan pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara (Surya, 2013).

Selanjutnya, barang publik sempurna (*pure public goods*) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Satu terminologi lain yang agak mirip adalah barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum (keseluruhan), sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat (satu komunitas yang lebih kecil) dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut.

Perbedaan barang publik dengan barang yang lain :

a) Non-eksklusivitas.

Salah satu sifat yang membedakan barang publik dengan barang lain adalah apakah orang dapat dikecualikan dari

manfaat barang tersebut atau tidak. Bagi kebanyakan barang pribadi, pengecualian tentu saja sangat dimungkinkan. Pertahanan nasional merupakan contoh standar. Sekali suatu angkatan bersenjata dibentuk, setiap orang di suatu negara tersebut diuntungkan, apakah dia membayar atau tidak. Barang noneksklusif ini dapat dilawan dengan barang konsumsi pribadi yang eksklusif, seperti mobil atau film dimana pengecualian-pengecualian merupakan suatu masalah sederhana. Mereka yang tidak membayar barang pribadi tersebut tidak menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut.

b) Non-rivalitas.

Sifat kedua yang menjadi karakter dari barang-barang publik adalah nonrivalitas. Barang-barang nonrivalitas adalah barang dimana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marjinal nol. Pada sebagian besar barang, tambahan jumlah konsumsi membutuhkan sejumlah biaya produksi marjinal. Misalkan tambahan pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya meskipun tindakan ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. Konsumsi oleh tambahan pengguna dari barang semacam itu adalah nonrivalitas/nonpersaingan sehingga tambahan konsumsi tersebut membutuhkan biaya marjinal sosial dari produksi sebesar nol, konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsi.

Barang publik murni adalah barang publik di mana biaya marginal untuk menyediakannya terhadap tambahan orang adalah nol dan di mana tidak mungkin melarang orang untuk menerima barang. Pertahanan nasional adalah salah satu dari sedikit contoh barang publik murni. Barang publik murni disediakan secara efisien ketika penjumlahan dari tingkat marginal substitusi (atas semua individu) adalah sama dengan transformasi marginal.

Barang publik murni memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaannya, yaitu :

➤ *Non-rivalry*

Berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Contoh lain seperti lampu lalu lintas.

➤ *Non-excludable*

Berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contoh, masyarakat membayar pajak kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian, dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan (*excludable*) dalam mengambil manfaat atas barang publik. (Gruber, 2013)

Adapun contoh-contoh barang publik diantaranya lampu lalu lintas, jalan raya, taman, dan lain sebagainya.

*Free Riders* dalam Penyediaan Barang Publik. *Free riders* adalah permasalahan yang muncul dalam penyediaan barang publik terkait dengan kedua sifatnya, yaitu *Non-rivalry* dan *Non-excludable*. *Free riders* ini adalah mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu, sementara sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk

mengadakan barang publik tersebut. Contohnya adalah mereka yang tidak membayar pajak tadi, tapi ikut menikmati jasa-jasa atau barang-barang yang diadakan atas biaya pajak. Contoh lain, sebuah jalan desa dibangun dengan kerja bakti. *Free riders* adalah mereka yang tidak ikut kerja bakti, tetapi kemudian ikut menggunakan jalan desa tersebut.

## 2. Syarat Efisiensi Untuk Barang Publik

Pembahasan utama dalam syarat efisiensi untuk barang publik adalah berapa banyak penawaran barang publik. Apa itu berarti pemerintah men-*supply* terlalu banyak atau terlalu sedikit barang publik? Dalam pembahasan ini kita mengkarakteristikkan apa yang diperlukan untuk efisiensi pareto dalam penyediaan barang publik murni dan secara umum, barang memiliki biaya marginal dari tambahan individu yang menikmatinya adalah nol. Barang publik murni disediakan secara efisien ketika penjumlahan dari tingkat marginal substitusi (atas semua individu) adalah sama dengan transformasi marginal. Tingkat marginal substitusi dari barang privat untuk barang publik menjelaskan berapa banyak dari barang privat tiap individu yang ingin membayar untuk memperoleh satu barang publik. Penjumlahan dari tingkat substitusi marginal kemudian menjelaskan kepada kita berapa banyak barang privat dalam anggota masyarakat yang akan ditukarkan untuk memperoleh satu Unit barang publik. Penjumlahan dari tingkat substitusi marginal kemudian menjelaskan kepada kita berapa banyak barang privat dalam anggota masyarakat yang akan ditukarkan untuk memperoleh satu unit barang publik. Efisiensi mensyaratkan, bahwa jumlah total yang ingin individu korbakan dikurangi jumlah tingkat substitusi marginal harus sama dengan jumlah yang mereka korbakan dikurangi tingkat transformasi marginal.

### B. Barang Privat Yang disediakan Oleh Pemerintah

Barang privat adalah barang-barang yang memiliki sifat berkebalikan dengan barang publik. Barang privat secara tipikal

adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, dimana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Oleh karena itu, kepemilikan barang privat biasanya dapat teridentifikasi dengan baik. Sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang yang hanya dapat digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu. Misalnya, ketika seseorang sedang memakan kue miliknya, orang lain tidak dapat melakukan hal serupa. Eksklusivitas kepemilikan menjadi faktor pembeda utama barang privat dengan barang publik.

Barang swasta dapat dikenali dengan mudah menggunakan prinsip *excludability* dan *rivalry*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak menafikan orang dalam penggunaannya dengan kompetisi yang sangat tinggi. Barang jenis dapat ditentukan secara mudah orang yang memanfaatkannya, sehingga mudah untuk dikenakan biaya. Jenis barang privat juga dengan mudah menghindari *free rider*. Pembatasan pemanfaatan barang/jasa tersebut juga dapat dibatasi sehingga lahirnya kompetisi seperti karakteristik barang ini dimuka. Selain itu, harga barang privat dapat ditentukan dengan mudah oleh mekanisme pasar antara produsen dan konsumen.

Penyediaan Barang Publik dan Privat dilakukan oleh baik oleh pemerintah melalui institusi politik, maupun dilakukan oleh swasta melalui pasar. Mekanisme distribusi tergantung pada aturan dan kesepakatan yang berlaku dimasyarakat. Barang publik tidak selalu disediakan oleh pemerintah dan sebaliknya barang privat juga tidak selalu disediakan swasta. Sebagai contoh barang privat yang disediakan pemerintah: jasa transportasi (kendaraan dinas), listrik, air minum. Sedangkan barang publik yang dikelola swasta melalui pasar contohnya adalah jasa hiburan, club khusus, televisi dan jasa komunikasi lain. Namun barang dan jasa dapat juga disediakan oleh swasta melalui pasar dan pemerintah melalui instansi politik: sekolah swasta dan negeri, taman rekreasi, lapangan olah raga (tenis, golf, kolam renang).

Beberapa infrastruktur yang dibangun pemerintah merupakan barang privat seperti pelabuhan, bandara, dan kereta api. Artinya,

saat kita menggunakan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah tersebut kita harus membayar.

Secara singkat penjabaran sifat atau karakteristik dari barang privat adalah sebagai berikut:

### 1. Rivalitas tinggi

Barang privat adalah barang yang dalam memanfaatkannya, akan mengurangi kesempatan pihak lain untuk menikmatinya. Di dalam barang privat, terjadi rivalitas antara pembeli satu dengan pembeli yang lainnya.

### 2. Eksklusif

Barang privat menawarkan eksklusifitas karena tidak semua orang dapat memilikinya, dan ketika seseorang memilikinya, maka barang tersebut menjadi kepemilikannya secara pribadi. Dalam mendapatkan barang privat juga meliputi persyaratan atau kriteria tertentu yang harus dimiliki sehingga bisa memiliki barang tersebut. Misalnya, harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu, memenuhi syarat tertentu, dan sebagainya.

### 3. Terbatas

Jumlah dari barang privat adalah terbatas. Tidak seperti barang publik yang jumlahnya berlimpah, dalam barang privat maka tidak semua orang bisa memilikinya apabila kuota yang ada telah mencukupi atau habis.

## C. Perbedaan Barang Publik dan Barang Privat

KARAKTERISTIK (PERBEDAAN)	Public Goods	Private Goods
1. Pengertian	Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi	Barang privat adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, dimana titik temu antara produsen

	<p>konsumsi orang (penawaran) dan lain akan barang konsumen tersebut dan (permintaan) adalah Barang publik mekanisme harga. merupakan barang- Sebagian besar barang yang tidak barang yang kita dapat dibatasi siapa konsumsi adalah penggunaannya dan barang privat, yaitu sebisa mungkin barang yang hanya bahkan seseorang dapat digunakan tidak perlu oleh satu konsumen mengeluarkan biaya untuk pada satu waktu. mendapatkannya. Contoh: ketika orang sedang makan kue Contoh: udara, miliknya, orang lain cahaya matahari, tidak bisa papan marka jalan, melakukan hal yang lampu lalu lintas, serupa. pertahanan nasional, pemerintahan dsb</p>
2. Sifat	<p>♣ <i>Non-Rivalry</i>: dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap satu suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi</p> <p>♣ <i>Rivalrous Consumption</i>: dimana konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Terjadi rivalitas/kompetisi antar calon konsumen dalam</p>

<p>barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil suatu manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain</p> <p>Contoh: dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara dan sinar matahari, orang-orang disekitar kita pun dapat mengambil manfaat yang sama.</p> <p>♣ <i>Non-Excludable</i>: barang publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak akan dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.</p>	<p>mengkonsumsi barang ini.</p> <p>Contoh: kita membeli buku yang jumlahnya terbatas, sehingga hanya mereka yang membeli dahulu saja yang dapat memiliki. maka disini terjadi kompetisi dalam mencari dan membeli buku tersebut.</p> <p>♣ <i>Excludable Consumption</i>: dimana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu, dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut</p> <p>Contoh: pakaian ditoko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau</p>
---	--

	<p>Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contoh: masyarakat yang membayar pajak diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian misalnya, akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja.</p>	<p>membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut.</p>
3. Jenis	<p>♣Barang Publik Lokal: barang yang menurut penyediaannya oleh pemerintah daerah dan secara teknologi layak dan perolehan keuntungannya dinikmati oleh penduduk</p>	<p>Pada barang privat ini mengenai jenisnya, tergantung pada individu masing-masing. Mengenai jenis dan macam barang privat disesuaikan oleh kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Jadi pada hal ini tidak ada</p>

	<p>setempat.</p> <p>♣Barang Publik Nasional: barang-barang yang penyediaannya oleh pemerintah pusat dengan perolehan keuntungan yang dinikmati dan selain penduduk setempat juga masyarakat dalam suatu negara.</p> <p>♣Barang Publik Murni: tidak ada seorang (pihak swasta) yang mau menghasilkan, karena masalah kepemilikan. Sebagaimana namanya, maka barang ini tidak bisa dimiliki perorangan, tetapi oleh masyarakat luas, walaupun yang mengelola adalah pihak tertentu, seperti jalan yang dikelola oleh pemerintah.</p> <p>♣Barang Publik Tidak Murni: letak barang publik yang</p>	<p>orang lain yang membatasi maupun melarang kebutuhan akan barang privat apa yang ingin dikonsumsi guna memuaskan kebutuhan diri sendiri.</p>
--	--	--

	jauh dari jangkauan konsumen, jasa yang diterimanya makin kecil juga untuk karakteristiknya.	
4.Sistem Pembiayaan	<p>Sektor publik yang mampu melakukan investasi untuk memberikan pelayanan kemudian sektor swasta menjalankan dengan menjalankan dengan mengenakan biaya pada pemakai, sistem ini disebut Build-Operate-Transfer.</p> <p>o Persaingan rendah: barang publik (biaya sektor publik) contohnya jalan toll menggunakan biaya campuran antara biaya publik dan biaya swasta</p> <p>o Persaingan tinggi: barang publik (biaya sektor publik) sedangkan</p>	<p>Sektor swasta (individu maupun kelompok) mampu memenuhi kebutuhannya sesuai dengan manfaatnya dan biaya yang telah tersedia.</p> <p>Contoh: jasa telekomunikasi, sebagian besar semua konsumen mampu dapat memilikinya secara individu.</p>

	barang swasta (biaya dari pihak swasta)	
5. Pelayanannya	<p>♣Sesuai dengan Fungsi Alokasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang diperuntukkan secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.</p> <p>♣Fungsi Distribusi: memiliki keterkaitan erat dengan perataan kesejahteraan masyarakat dalam arti proporsional tetap menjadi perhatian dalam rangka mendorong tercapinya pertumbuhan yang optimal</p> <p>♣Fungsi Stabilisasi: memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro</p>	<p>Tidak ada campur tangan pemerintah jadi tergantung dari fungsi dalam pemenuhan kebutuhan, setiap perorangan tidak sama dalam memenuhi kebutuhannya, disesuaikan denangan fungsi barang privat yang akan dikonsumsi.</p>

	dengan sasaran untuk mencapai stabilitas ekonomi secara nasional	
6. Jumlah	Banyak bahkan melimpah.	Langka atau keterbatasan dalam jumlah.
7. Kepemilikan	Sulit diidentifikasi (milik umum).	Teridentifikasi dengan baik (milik pribadi).



## BAB VII PRODUKSI PUBLIK DAN BIROKRASI

### A. Produksi Publik & Birokrasi

#### 1. Produksi Publik

Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaannya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Ini berarti konsumsi atas barang tersebut oleh satu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya dan non-eksklusif berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. Barang publik (*public goods*) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik sempurna (*pure public goods*) adalah barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum

(keseluruhan), sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat (satu komunitas yang lebih kecil) dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut.

## **2. Birokrasi**

Secara umum, pengertian birokrasi adalah rantai komando berbentuk piramida dalam suatu organisasi dimana posisi di tingkat bawah lebih banyak daripada tingkat atas. Ada juga yang menjelaskan arti birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hirarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Organisasi yang menjalankan sistem birokrasi biasanya memiliki prosedur dan aturan yang ketat sehingga dalam proses operasionalnya cenderung kurang fleksibel dan kurang efisien.

Birokrasi banyak ditemukan dalam organisasi pemerintahan, rumah sakit, perusahaan, sekolah, dan militer. Meskipun ada anggapan bahwa birokrasi identik dengan inefisiensi, pemborosan, dan kemalasan, faktanya sistem birokrasi diperlukan agar proses operasional berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

## **B. Monopoli Alamiah, Produksi Publik Barang-Barang Swasta Serta Perbandingan Efisiensi Pada Sektor Publik & Swasta**

### **1. Monopoli Alamiah**

Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini, sesungguhnya pasar bersifat terbuka. Karena itu, perusahaan lain tidak mampu menandingi perusahaan monopolistis tadi sehingga perusahaan yang unggul tadi relatif menguasai pasar dalam jenis industri tersebut.

Di Indonesia untuk mengatur praktek monopoli telah dibuat sebuah undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu adalah undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. UU ini dibagi menjadi 11 bab yang terdiri dari beberapa pasal.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk melihat lebih jauh mengenai kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif dan kondusif bagi kegiatan bisnis yang baik dan etis. Kita harus bisa menerapkan sistem ekonomi pasar bebas secara baik dan fair dalam kegiatan bisnis. Agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara semestinya. Untuk itu, perlu perundang-undangan yang mengatur kegiatan tersebut.

Monopoli alamiah adalah monopoli yang terjadi sebagai akibat dari adanya pemasok besar dalam sebuah industri yang menguasai pasar karena unggul dari segi harga maupun kualitas dibandingkan pesaingnya. Ini cenderung menjadi kasus dalam sebuah industri dimana biaya modal mendominasi, menciptakan skala ekonomi yang besar dalam kaitannya dengan ukuran pasar, dan adanya hambatan yang tinggi untuk masuk ke pasar. Contoh: pelayanan publik seperti pelayanan air dan listrik untuk membangun jaringan transmisi dibutuhkan investasi yang cukup besar, sehingga tidak mungkin bahwa pesaing potensial akan bersedia untuk melakukan investasi modal yang dibutuhkan bahkan untuk memasuki pasar monopoli.

Ciri khas perusahaan monopoli adalah:

- a) Hanya terdapat satu penjual dalam pasar;
- b) Tidak ada barang pengganti (substitusi) yang dapat dipasok oleh orang lain. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *no close substitute*;
- c) Harga produk/layanan diatur oleh satu perusahaan. Perusahaan monopoli adalah *price maker*;
- d) Perusahaan lain (kompetitor baru) akan kesulitan untuk memasuki pasar;
- e) Konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk pindah penyedia layanan (*vendor*);
- f) Praktek monopoli tentu saja dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian untuk masyarakat;
- g) Umumnya perusahaan-perusahaan monopoli memiliki anggaran beriklan (dan pemasaran) yang relatif kecil;

Ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu perusahaan dapat menjadi monopoli, antara lain:

- a) Perusahaan tersebut menguasai bahan mentah (*raw material*) yang banyak dibutuhkan pembeli;
- b) Perusahaan memiliki teknik produksi atau cara produksi yang tidak dimiliki oleh orang lain;
- c) Adanya hak istimewa dari pemerintah, seperti hak paten atas penemuan tertentu dan lisensi;
- d) Perusahaan memiliki modal yang besar (misal gabungan beberapa perusahaan). Contoh perusahaan obat yang membeli perusahaan pesaing untuk menguasai pasar;
- e) Perusahaan memiliki prestasi atau keahlian yang unik dan tidak dimiliki oleh orang lain. Misal dalam bisnis *startup*,

terdapat teknologi canggih *artificial intelligent* yang tidak dimiliki orang lain;

- f) Perusahaan sudah terlalu besar, sehingga menguasai hulu ke hilir dan membentuk ekosistem yang sulit dimasuki pemain baru;
- g) Adanya keterbatasan pasar dan sifat alamiah industri.

Secara umum perusahaan yang memonopoli pasar harus mengeluarkan uang ekstra untuk inovasi, karena perusahaan tersebut harus memiliki teknologi terbaru untuk tetap menjadi monopoli.

Kelemahan pasar monopoli:

- a) Dalam beberapa kasus pembeli (*customer*) dirugikan, karena pembeli tidak memiliki pilihan lain;
- b) Perusahaan monopoli terkadang memasang harga jual yang cukup mahal (tetapi dalam batasan terjangkau oleh pembeli), karena hanya ada satu penjual di pasar;
- c) Perusahaan monopoli sering mengeksploitasi faktor-faktor produksi dan sumber daya lainnya.

## 2. Produksi Publik Barang-Barang Swasta

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dihasilkan pihak swasta kepada masyarakat. Penyediaan barang publik dalam jumlah terlalu besar akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber ekonomi, sebaliknya penyediaan barang publik yang terlalu sedikit akan menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat. A.C Pigou (Guritno,2003:63) berpendapat bahwa penyediaan barang publik akan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun, pajak yang dikenakan atas barang publik tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Semakin banyak barang dan jasa publik yang disediakan pemerintah, maka tambahan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan

semakin menurun. Semakin banyak barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah, akan semakin besar biaya yang dibutuhkan sehingga menyebabkan konsekuensi semakin besar pula pajak yang akan dipungut dari masyarakat. Keadaan ini menyebabkan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat. Secara teoritis, penyediaan barang dan jasa publik akan optimal, apabila kepuasan yang diperoleh masyarakat sama dengan ketidakpuasan yang didapatkan masyarakat sebagai akibat dari pemungutan pajak. Contoh produksi barang swasta yaitu kendaraan (mobil, sepeda motor, dll), LBB (Lembaga Bimbingan Belajar) Swasta, pakaian (baju, tas, sepatunya, dll).

### 3. Perbandingan Efisiensi Pada Sektor Publik & Swasta

<b>KARAKTERISTIK (PERBEDAAN)</b>	<b>BARANG PUBLIK</b>	<b>BARANG SWASTA</b>
1. Pengertian	Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut dan Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaannya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh: udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional,	Barang privat adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, dimana titik temu antara produsen (penawaran) dan konsumen (permintaan) adalah mekanisme harga. Sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang yang hanya dapat digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu. Contoh: ketika orang sedang makan kue miliknya, orang lain

	pemerintahan dsb	tidak bisa melakukan hal yang serupa.
2. Sifat	<p><i>Non Rivalry</i>: dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap satu suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil suatu manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain Contoh: dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara dan sinar matahari, orang-orang disekitar kita pun dapat mengambil manfaat yang sama.</p> <p>♣ <i>Non Excludable</i>: baran publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak akan dapat yang menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan</p>	<p><i>Rivalrous Cosumption</i>: dimana konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Terjadi rivalitas/kompetisi antar calon konsumen dalam mengkonsumsi barang ini. Contoh: kita membeli buku yang jumlahnya terbatas, sehingga hanya mereka yang membeli dahulu saja yang dapat memiliki.maka disini terjadi kompetisi dalam mencari dan membeli buku tersebut.</p> <p>♣ <i>Ekscludable Consumption</i>: dimana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi pesyaratan tertentu, dan mereka yang tidak membayar</p>

	<p>kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contoh: masyarakat yang membayar pajak diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian misalnya, akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja</p>	<p>atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut. Contoh: pakaian ditoko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut.</p>
3. Jenis	<p>Barang Publik Lokal: barang yang menurut penyediaannya oleh pemerintah daerah dan secara teknologi layak dan perolehan keuntungannya dinikmati oleh penduduk setempat.</p> <p>♣Barang Publik Nasional: barang-barang yang penyediaannya oleh pemerintah pusat dengan perolehan keuntungan yang dinikmati dan selain</p>	<p>Pada barang privat ini mengenai jenisnya, tergantung pada individu masing-masing. Mengenai jenis dan macam barang privat disesuaikan oleh kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Jadi pada hal ini tidak ada orang lain yang membatasi maupun melarang</p>

	<p>penduduk setempat juga masyarakat dalam suatu negara.</p> <p>♣Barang Publik Murni: tidak ada seorang (pihak swasta) yang mau menghasilkan, karena masalah kepemilikan. Sebagaimana namanya, maka barang ini tidak bisa dimiliki perorangan, tetapi oleh masyarakat luas, walaupun yang mengelola adalah pihak tertentu, seperti jalan yang dikelola oleh pemerintah.</p> <p>♣Barang Publik Tidak Murni: letak barang publik yang jauh dari jangkauan konsumen, jasa yang diterimanya makin kecil juga untuk karakteristiknya.</p>	<p>kebutuhan akan barang privat apa yang ingin dikonsumsi guna memuaskan kebutuhan diri sendiri.</p>
4.Sistem Pembiayaan	<p>Sektor publik yang mampu melakukan investasi untuk memberikan pelayanan kemudian sektor swasta menjalankan dengan menjalankan dengan mengenakan biaya pada pemakai, sistem ini</p>	<p>Sektor swasta (individu maupun kelompok) mampu memenuhi kebutuhannya sesuai dengan manfaatnya dan biaya yang telah tersedia. Contoh: jasa telekomunikasi,</p>

	<p>disebut <i>Build-Operate-Transfer</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Persaingan rendah: barang publik (biaya sektor publik) contohnya jalan tol menggunakan biaya campuran antara biaya publik dan biaya swasta</li> <li>o Persaingan tinggi: barang publik (biaya sektor publik) sedangkan barang swasta (biaya dari pihak swasta)</li> </ul>	<p>sebagian besar semua konsumen mampu dapat memilikinya secara individu.</p>
5. Pelayanannya	<p>Sesuai dengan Fungsi Alokasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang diperuntukkan secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.</p> <p>Fungsi Distribusi: memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam arti proporsional tetap menjadi perhatian dalam rangka mendorong tercapinya pertumbuhan yang</p>	<p>Tidak ada campur tangan pemerintah jadi tergantung dari fungsi dalam pemenuhan kebutuhan, setiap perorangan tidak sama dalam memenuhi kebutuhannya, disesuaikan dengan fungsi barang privat yang akan dikonsumsi.</p>

	optimal. Fungsi Stabilisasi: memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan sasaran untuk mencapai stabilitas ekonomi secara nasional.	
6. Jumlah	Banyak bahkan melimpah.	Langka atau keterbatasan dalam jumlah.
7. Kepemilikan	Sulit di identifikasi (milik umum)	Teridentifikasi dengan baik (milik pribadi).

### **C. Sumber Ketidak Efisienan pada Sektor Publik, Korporatisasi dan Perkembangan Konsensus pada Peran Pemerintah Dalam Produksi**

#### **1. Sumber Ketidakefisienan Pada Sektor Publik**

Adanya beberapa alasan mengapa perusahaan pemerintah terkadang kurang efisien daripada perusahaan swasta.

##### **a. Insentif Organisasi**

Dikarenakan perusahaan publik tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, maka biasanya memiliki insentif yang lebih kecil untuk memaksimalkan produktivitas. Di samping itu, juga terkadang dikendalikan oleh isu-isu politik, seperti penyediaan lapangan kerja didaerah yang tingkat perguruan tinggi. Di beberapa Negara, perusahaan publik terkadang tidak memikirkan kerugian, dikarenakan ditopang oleh pemerintah dan ada jaminan tidak akan bangkrut. Di sisi lain, perusahaan publik beroperasi dilindungi dengan persaingan yang terbatas.

b. Pembatasan Manajemen

Perusahaan swasta dapat mempekerjakan siapapun yang diminati dan membayar gaji sesuai yang diminta. Pengusahalah yang menderita kerugian bila membayar seseorang lebih daripada nilainya. Walaupun pemerintah telah menetapkan serangkaian peraturan untuk menyeleksi pegawai pemerintah, namun sulit bagi lembaga pemerintah untuk memecat pekerja yang tidak kompeten. Sangat sulit bagi pemerintah untuk bersaing dengan perusahaan swasta yang menawarkan gaji lebih tinggi untuk kualifikasi pegawai yang sama.

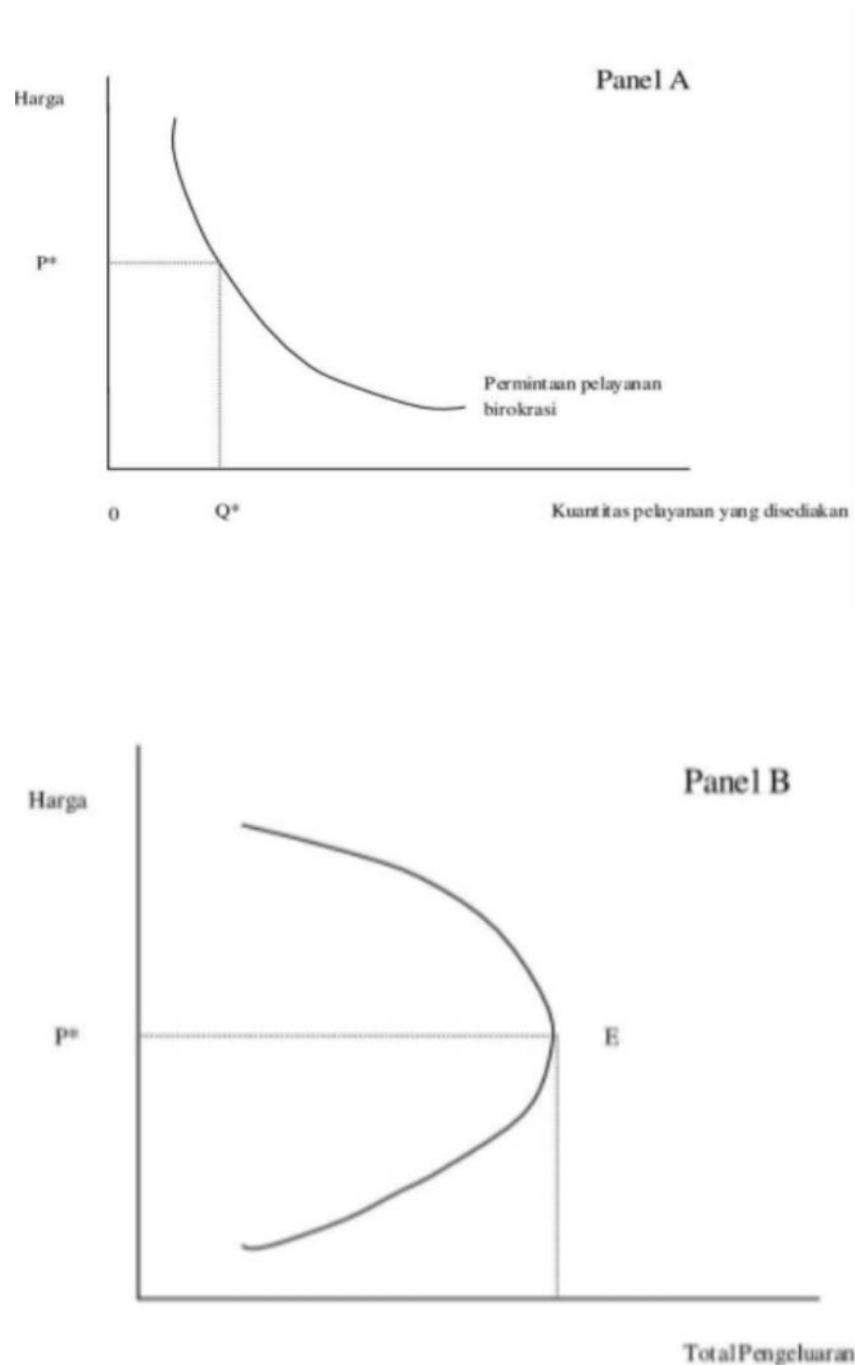
c. Prosedur Pembelian

Prosedur Pembelian di pemerintah telah didesain untuk menghindari pembelian semena-mena barang atau jasa yang membuang uang Negara. Namun efek dari prosedur ini adalah naiknya biaya pembelian. Dalam banyak sektor, pemerintah mengadakan penawaran terbuka, namun sebelumnya, pemerintah harus membuat dahulu deskripsi detil tentang apa yang mereka butuhkan. Tentu saja hal ini selain memakan waktu, juga mengeluarkan biaya ekstra.

d. Pembatasan Anggaran

Pembatasan lain antara perusahaan pemerintah dengan perusahaan swasta adalah dalam anggaran, terutama menyangkut investasi jangka panjang. Perusahaan swasta seperti maskapai penerbangan, juga membutuhkan waktu bertahun-tahun dan anggaran yang sangat besar untuk membangun system pemasaran tiket, namun mereka dapat dengan mudah mengeluarkan anggaran bagi apa yang mereka ketahui penting bagi usahanya. Namun dibandingkan dengan perusahaan pemerintah, walaupun mereka mengetahui ada sesuatu yang penting yang harus dibeli segera, mereka biasanya terpaksa pada anggaran rutin yang terbatas. Terkadang apa yang dilakukan adalah sesuatu

yang direncanakan tahun sebelumnya yang mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi di saat ini.



Gambar 8.2. Ukuran Maksimisasi Birokrasi

Banyak alasan mengapa pegawai pemerintah memiliki kinerja yang berbeda dengan pegawai swasta. Mereka tidak dapat dipecat, dan tidak ada insentif bagi yang bekerja lebih

baik daripada pegawai lain. Mereka lebih berorientasi pada politik daripada memuaskan konsumennya. Ini adalah yang disebut tingkah laku birokratik. Birokrat mungkin tidak akan menerima pembagian deviden atas meningkatnya efisiensi perusahaannya, namun mereka menikmati kekuasaan dan prestise yang disandingkannya.

Para pegawai pemerintah berusaha untuk memaksimalkan birokrasi, bila kurva permintaan untuk pelayanan publik kurang dari elastisitas, mereka menurunkan efisiensi (menaikkan harga per unit pelayanan yang disediakan), dan mereka dapat meningkatkan total pengeluaran dilembaganya, seperti pada gambar. Tang dapat menghentikan ini adalah kompetisi antar para birokrat itu sendiri.

Pada gambar tersebut dijelaskan sebuah kurva peningkatan untuk pelayanan birokrasi. Ketika harga pelayanan (biaya per unit) menurun, kuantitas pelayanan yang diminta akan meningkat. Birokrat dapat menghitung pengeluaran (harga dikalikan kuantitas) pada setiap level harga, seperti pada gambar panel B. saat tidak ada kompetisi, birokrat dapat memilih harga, dan tentunya mereka dapat memilih harga dimana memaksimalkan total pengeluaran (ukuran dari birokrasi mereka). Pada titik  $P^*$ , pengeluaran dimaksimalkan.

## 2. Korporatisasi

Ada banyak kasus di mana perusahaan pemerintah kurang efisien bila dibandingkan dengan perusahaan swasta. Bila demikian, maka timbul pertanyaan, mengapa perusahaan pemerintah tidak diubah saja menjadi perusahaan swasta agar menjadi lebih efisien dan menguntungkan? Sebelum perusahaan pemerintah menjadi perusahaan swasta, ada tahap intermediate, yaitu korporatisasi. Efisiensi sering tercapai pada tahap ini, dan menjadi pertanyaan ; mengapa hal ini dapat terjadi? Ada beberapa alasan antara lain tentang kebebasan bertindak, perbedaan usaha, dan dan yang terbatas. Alasan lain, jika tanpa motif keuangan, maka pencapaian hasil tidak akan optimal. Para pekerja pada perusahaan pemerintah bekerja

lebih baik setelah menjadi perusahaan swasta, dikarenakan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

Jika demikian faktanya, mengapa tidak semua perusahaan pemerintah dijadikan perusahaan swasta? Jawabannya, tidak semua tujuan perusahaan pemerintah dapat dipenuhi oleh perusahaan swasta. Beberapa perusahaan pemerintah bukan bertujuan mencari keuntungan, namun memenuhi kebutuhan hidup yang penting bagi sebagian atau seluruh masyarakat.

### **3. Perkembangan Konsensus Pada Peran Pemerintah Dalam Produksi**

Peran pemerintah dalam produksi merupakan debat yang tiada habisnya. Saat ini, ada konsensus bahwa pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam produksi barang swasta umum. Misalnya, apakah lembaga permasyarakatan, sekolah atau produksi material untuk membuat bom nuklir seharusnya diprivasi? Atau dapatkah tercapai efisiensi dengan cara korporatisasi, dan bertujuan mendorong perusahaan publik untuk memikirkan konsumen mereka?

Sangat sulit mengukur performa dari sektor publik dan sektor swasta. Sangat tidak mungkin semua produksi dikompetisikan atau diproduksi oleh lebih dari satu perusahaan. Apakah mungkin mengkompetisikan Angkatan Bersenjata Nasional sebaliknya saat ini telah diadakan kompetisi untuk sektor komunikasi, kesehatan dan pendidikan. Namun saat kompetisi telah terjadi, bagaimana kita memastikan perusahaan publik dan swasta berada pada sebuah level yang sama, yang tidak ada subsidi tersembunyi dalam sektor publik?

Alasan inefisiensi (ketidakefisienan) pada sektor publik :

1. Perbedaan organisasi :
  - a) Mendapat subsidi pemerintah, tidak akan bangkrut;
  - b) Lebih berorientasi politik;
  - c) Tidak adanya kompetisi;

- d) Pembatasan pegawai (pegawai tidak dapat dipecat, gaji lebih rendah);
  - e) Prosedur pembelian lebih rumit;
  - f) Pembatasan anggaran.
2. Perbedaan individu
  3. Tidak adanya insentif.
  4. Tujuan birokrat : memaksimalkan organisasi.

Ada beberapa alasan mengapa pada tahap korporatisasi, efisiensi sering tercapai, antara lain adanya kebebasan bertindak, perbedaan usaha, dan dana yang terbatas. Alasan lain, jika tanpa motif keuntungan, maka pencapaian hasil tidak akan optimal. Para pekerja pada perusahaan pemerintah bekerja lebih baik setelah menjadi perusahaan swasta, karena mendapat pendapatan yang lebih tinggi.

Peranan pemerintah dalam produksi merupakan debat yang tiada habisnya. Ada konsensus bahwa pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam produksi barang swasta umum. Atau dapatkah tercapai efisiensi dengan cara korporatisasi? Sangat sulit mengukur performa dari sektor publik dan sektor swasta dan sangat tidak mungkin semua produksi dikompetisikan, walaupun sudah ada beberapa yang saat ini mulai terbuka kompetisi, misalnya pada sektor komunikasi, kesehatan dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwimarta, Sri Sukei *et al.* 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Doli D.Siregar. 2016. *Desentralisasi Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. SIMA. Jakarta.
- Henry, Faizal, Noor. 2015. *Ekonomi Publik*. Jakarta. Indeks.
- Iklal Hadi Anfana. 2015. *Konsep Efisiensi Pareto, Barang Public dan Kegagalan Pasar*. Makalah.
- Laily Nur & Pristyadi, Budiyo, 2013, *Teori Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Mangkoesebroto. Guritno, Dr. M.Ec, 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Noor, Muh. Bakat Maulidun. 1989. *Ekonomi Koperasi*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Intan Pariwara.
- Priyarsono. D.S, Widyastutik, dan Reinhardt. Henny, 2017. *Ekonomi Publik*. Banten. Universitas Terbuka.
- Priyono dan Ismail, Zainuddin, 2012. *Teori Ekonomi*. Surabaya. Dharma Ilmu.
- Ridwan, dan Nawir, Ihsan, Suciawan, 2021. *Buku Ekonomi Publik*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Stigliz, Joseph E, (2000), *Economics of The Public Sektor*, Third Edition. New York: W.W.Norton & Company.
- Wahluyo, Dwi Eko, 2006, *Ekonomi Makro*, Edisi Revisi, Malang:FE-UMM

<https://centrausaha.com/efisiensi-pareto-ekonomi-sektor-publik/>

<https://firiijb.wordpress.com/tag/efisiensi-pareto/>

<http://www.jurnalsocialsecurity.com/news/kebijakan-pemerintah-kaitannya-dengan-kesejahteraan.html>

[indikator-ekonomi-publik.blogspot.com](http://indikator-ekonomi-publik.blogspot.com)

<https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-distribusi.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_pilihan\\_rasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_pilihan_rasional)

: <http://gioakram13.blogspot.com/2013/05/materi-pokok-ekonomi-publik.html#ixzz63WPNpz00>

<https://azise.blogspot.com/2013/05/karakteristik-public-goods-dan-private.html?m=1>

- [http://pendidikanku13.blogspot.com/2016/10/barang-publik\\_16.html](http://pendidikanku13.blogspot.com/2016/10/barang-publik_16.html)
- <http://yurikaxanthiniawijayanti.blogspot.com/2011/10/barang-publik.html>
- <https://faruknanangkurniawan92.wordpress.com/2015/06/13/barang-publik-dan-barang-swasta/>
- <http://idayoce.blogspot.com/2016/07/barang-publik-dan-barang-privat.html>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan\\_ekonomi#:~:text=Kebijakan n%20ekonomi%20adalah%20tindakan%20pemerintah,pe rdagangan%20mancanegara%20dan%20kebijakan%20ke tenagakerjaan.](https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_ekonomi#:~:text=Kebijakan%20ekonomi%20adalah%20tindakan%20pemerintah,pe rdagangan%20mancanegara%20dan%20kebijakan%20ke tenagakerjaan.)
- <http://duniakita15.blogspot.com/2014/11/barang-publik-karakteristik-dan.html>
- [https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian\\_-birokrasi-adalah.html](https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian_-birokrasi-adalah.html)
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/produksi>
- Makalah Kegagalan Pasar (18 Januari 2018) diperoleh dari <http://mugnisulaeman.blogspot.com/2018/01/makalah-kegagalan-pasar.html> (Diakses 18 Oktober 2019).
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pasare> . Pengertian Pasar. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Diperoleh dari <https://anisfitriaambarwati.wordpress.com/ekonomi-publik/kegagalan-pasar-dan-campur-tangan-pemerintah/> (Diakses 18 Oktober 2019).
- Kegagalan Pasar Dan Pemerintah (April 2017) diperoleh dari [https://dhanywisnup.wordpress.com/ekonomi-pembangunan/ekonomi-publik/\\_kegagalan-pasar-dan-pemerintah/](https://dhanywisnup.wordpress.com/ekonomi-pembangunan/ekonomi-publik/_kegagalan-pasar-dan-pemerintah/) (Diakses 20 Oktober 2019).
- Pengertian Efisiensi. Diperoleh dari <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efisiensi.html> (diakses 29 Oktober 2019).
- Analisis ekonomi. Diperoleh dari <https://guruakuntansi.co.id/analisis-ekonomi/> (diakses 29 Oktober 2019).
- Model analisis ekonomi. (3 Januari 2013) Diperoleh dari <http://obrolanekonomi.blogspot.com/2013/01/3-model-analisis-ekonomi.html?m=1> (diakses 29 Oktober 2019).
- Pengertian efisiensi dalam teori ekonomi (Juli 2013) diperoleh dari

<http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/07/pengertian-efisiensi-dalam-teori-ekonomi.html> (diakses 29 Oktober 2019).

## RIWAYAT PENULIS



**Siti Raudah, S.Sos.,M.AP.**, terlahir di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kab. HSU pada Tanggal 01 April 1988 sebagai anak ke – 3 dari 5 bersaudara, dan dari Pasangan H. M. Usman bin Khalid (Alm) dan Hj.Rusmiyati Binti Busra. Status Perkawinan Menikah, Beliau bekerja sebagai Dosen STIA Amuntai dari Tanggal 24 Januari 2017 sesuai dengan TMT SK Mengajar di Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Amuntai, dan ini adalah Buku Cetakan Keempat Edisi Revisi yang ditulisnya untuk menunjang pengajaran dan pembelajaran mengenai Mata Kuliah Ekonomi Publik.

### Riwayat Pendidikan

- : 1. TK Kenari PGRI (1995)
2. SDN Murung Sari 2 (2000)
3. SLTPN 4 Amuntai (2003)
4. SMKN 1 Amuntai (2006/2007)
5. STIA Amuntai (2011)
6. MAP FISIP ULM BJM (2016)

### Riwayat Pekerjaan

- : 1. PT. Pos Indonesia
2. Kantor Camat Amuntai Tengah
3. Dinas Pasar Kebersihan & Tata Kota  
Kab. HSU
4. Disperindagkop&UKM Kab. HSU
5. Dosen STIA Amuntai
6. Pengadilan Agama Kelas I A Amuntai